

BAGIAN KETIGA

SIMBOL-SIMBOL DI SENAYAN

SD, SMP, SMU: KATEGORISASI

Seorang kawan baik saya yang juga adalah pimpinan salah satu fraksi di DPR punya kategorisasi menarik mengenai para koleganya. Suatu hari, menjelang malam kami berbincang ringan saja di berada rumah dinas DPR yang bertempat di daerah Kalibata itu. Angin agak sepoi-sepoi, dan setelah lama kami bicara kesana-kemari mengenai kebakaran suatu kampung di Jakarta Utara, gempa di Yogya, lalu tetek bengek partai, dan tentu saja keluhan pekerjaan di DPR, ia mulai membuat mimik wajah setengah bercanda lalu mengatakan "Anggota DPR itu ada tiga tingkatan, mulanya SD, lalu SMP, dan kemudian SMU." Saya mengernyitkan dahi, memberi tanda kalau saya tidak mengerti maksudnya. Mungkin karena ekspresi wajah saya benar-benar menunjukkan ketidakmengertian, ia mulai menerangkan, "SD artinya sudah duduk, kemudian SMP, sudah mulai pamer, dan ketiga SMU, sudah main uang." Ia tersenyum lebar dan mimik wajahnya seperti memenangkan teka-teki yang tak bisa saya jawab. Kami pun kemudian menertawakan bersama-sama arti istilah yang dibuatnya itu.

Ia kemudian mulai agak serius menerangkan definisi dari kategori yang dibuatnya, "Anggota DPR itu mulanya SD, sudah duduk, setelah memenangkan kursi di DPR. Nah lama-lama mereka SMP, sudah mulai pamer. Mulai membuat rumah yang bagus, mulai memamerkan harta dan penampilan, agar dapat dilihat sebagai anggota DPR yang terhormat. Nah yang paling bermasalah itu bila SMU, sudah main uang. Ia mencontohkan yang dimaksud main uang itu misalnya cari proyek sana-sini, korupsi, dan lain-lain. Inilah yang jadi sumber persoalan besar di DPR."

Tentu tidak semua anggota DPR berakhir dengan SMU atau main uang. Ungkapan kawan saya tadi menggambarkan kegelisahannya terhadap fenomena koleganya di parlemen, sekali lagi tidak semuanya berada pada kategorisasi SD, SMP, SMU, namun sindirannya juga tak dapat dipungkiri merupakan fenomena nyata pula pada anggota DPR. Saya mengambil satu dua contoh kecil saja untuk

menggambarkan apa yang dimaksud dengan fenomena SD, SMP, dan SMU itu. Pengungkapan mengenai contoh ini hanya dimaksudkan untuk merepresentasikan pola yang dianggap umum saja, namun harus digaris-bawahi bahwa tak semua anggota demikian, selalu ada variasi internal di dalam pola yang umum.

Baiklah kita lihat bagaimana contoh nyata dari kategorisasi yang dimaksudkan oleh informan saya. Mula-mula SD, sudah duduk sebagai anggota DPR. Hal yang penting adalah menegaskan kalau dirinya anggota DPR. Salah satunya adalah dengan menempatkan diri kepada siapa dia mesti bertemu orang. Misalnya Ibu DD merasa kalau untuk bertemu staf keuangan DPP partai guna menyerahkan iuran partai cukup sopir atau pengawalnya mewakili dirinya, tak perlu dirinya sendiri. Ia juga mulai suka menyebut nama-nama kawannya yang berada di jabatan pemerintahan. Lalu rajin-rajin cium pipi kanan kiri koleganya baik DPR maupun kolega pejabat pemerintahan bila bertemu. Beberapa kali ia bahkan menceritakan kebiasaan cium pipi kanan kiri antara ia dan pimpinan komisi baru yang mantan pejabat ketentaraan itu. Soal cium pipi kanan dan kiri ini, saya lihat hampir rata-rata anggota DPR melakukannya sebagai sebuah kelaziman dalam hubungan sosial mereka. Baik laki-laki maupun perempuan setiap bertemu kolega yang dikenalnya mereka cium pipi kanan kiri. Terkecuali FPKS tentu saja.

Ibu DD yang berangkat dari latar belakang pendidik ini senantiasa berpenampilan rapi dengan blazer dan make up yang agak tebal menonjol, menutupi flek di wajahnya yang sudah tak lagi muda. Itu di tahun pertama hingga kedua. Pada tahun berikutnya ia saya lihat mulai menyukai bentuk-bentuk perhiasan. Cincin bermata, lalu kalung yang panjang modelnya tersusun dari batu-batu kecil dan sesekali kalung panjang yang berbandul besar.

Soal perhiasan, kegemaran anggota DPR perempuan tertentu pada perhiasan seringkali jadi kesempatan bagi para penjual perhiasan untuk memperoleh keuntungan. Biasanya penjual perhiasan ini sebelumnya telah mengenal salah seorang anggota DPR lalu dari orang per oranglah mereka mendapatkan pelanggan. Mereka ini tak hanya sekali datang, saya bahkan mengenali penjual perhiasan mutiara yang berulang kali datang ke DPR. Mereka

berjualan dari satu ruangan ke ruangan lainnya setelah terlebih dahulu janji-janji lewat telepon. Tak ada modus penjualan terbuka. Penawaran perhiasan dilakukan di ruangan kantor. Namun demikian sesekali para penjual perhiasan mencari peluang situasi, misalnya di kala sidang paripurna DPR di mana sebagian besar semua anggota DPR berada di ruang sidang paripurna. Perhiasan ditawarkan bahkan di toilet sekitar gedung paripurna. Tanpa sengaja saya melihat itu suatu kali ketika sedang melakukan pengamatan terhadap sidang paripurna. Mendadak saya ingin ke toilet, maka masuklah saya di toilet yang diperuntukkan bagi perempuan. Ternyata telah ada di sana anggota DPR yang juga mantan model sedang merokok, ada pula beberapa orang lainnya yang selanjutnya saya lihat sedang menggelar perhiasan-perhiasan gemerlap. Mereka sedang berbicara, sepertinya sedang tawar-menawar harga perhiasan.

Selain senang perhiasan gemerlap, pada umumnya anggota DPR juga senang dengan yang berbau asing, istilah asing dan komparasi kebijakan dari negara asing, pokoknya asing. Saya pernah dibisiki oleh staf komisi kalau anggota DPR suka dengan penyebutan asing sebagai referensi kebijakan. Walau pun tentu saja ada pula anggota DPR yang tak suka penyebutan contoh kebijakan dari asing, tapi perlawanan mereka terhadap yang suka dengan contoh asing agaknya tak seberapa kuat. Rupanya LSM-LSM juga mulai paham kesukaan anggota DPR itu, maka beberapa LSM bila datang untuk advokasi kebijakan RUU tertentu, tak lupa menyampaikan dokumen komparasi kebijakan negara asing, atau setidaknya menyebutkan bahwa negara 'anu' melaksanakan kebijakan 'anu.' Tampaknya para LSM itu juga menggunakan klaim pengetahuan di dalam upayanya melakukan advokasi kebijakan. Ini bukan persoalan benar atau salah, cocok apa tidak cocok untuk Indonesia, yang penting adalah soal klaim pembenaran yang dapat membuat orang menerima perihal yang disampaikan. Penyebutan referensi negara anu kebijakan anu toh mampu membuat sebagian besar anggota DPR terkesima dan setidaknya-tidaknya mendengarkan masukan mereka.

Gagasan Foucault (1980) dalam "*Power and Knowledge*" untuk membongkar kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Pengetahuan dengan demikian memang tidak pernah berdiri netral, melainkan dapat menjadi

alat bagi beroperasinya praktek dominasi. Foucault lebih jauh menengarai bahwa pengetahuan memberikan kontribusi melanggengkan dominasi terhadap kelompok marjinal. Saya ingin meletakkan pernyataan Foucault mengenai kekuasaan dan pengetahuan ini, sebagai alat bantu untuk melihat penggunaan tempelan pengetahuan sebagai modus halus beroperasinya kekuasaan. Disini memang tak selalu soal substansi pengetahuan dari negara lain, kadang-kadang hanya merupakan tempelan seperti cap saja, cap bahwa kebijakan itu berasal dari negara 'anu' tanpa kajian mendalam mengenai konteks yang lebih dalam. Itu saja seringkali dianggap cukup untuk menyakinkan anggota DPR. Menurut saya penyebutan referensi negara anu merupakan upaya penggunaan klaim pengetahuan yang ditujukan agar maksud si penyampai mendapatkan penerimaan. Pada saat itulah sesungguhnya relasi kekuasaan melalui klaim pengetahuan itu bekerja.

Seperti begitu penting referensi asing itu diperlukan bagi rumusan kebijakan dalam negeri sehingga atas dasar alasan komparasi kebijakan dengan kebijakan asing itu, anggota DPR tak hanya senang dengan dokumen-dokumen kebijakan asing, tentu saja mereka juga dengan senang hati untuk melakukan kunjungan studi banding ke negara asing. Bahkan kini kunjungan ke negara asing adalah bahan pembicaraan atau bahkan sapaan ringan mereka, tak hanya satu dua kali soal kunjungan luar negeri itu jadi pembicaraan keseharian anggota DPR termasuk ketika di lift. Seperti suatu kali saya dengar dari mulut Ibu WL, seorang professor yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW). Mula saya bertemu dengannya ia berpenampilan sederhana dengan rok di bawah lutut, dan blus atau blazer yang sederhana saja. Beberapa bulan berikutnya saya bertemu dengannya, kami satu lift, ia menegur koleganya yang baru saja pulang dari kunjungan studi banding ke Italia, ia menyapa "...bagaimana Italia, bagus..?" Koleganya menjawab .."ya..ya begitulah," nadanya menggantung. Sayang lift kami terbuka, saya dan Ibu WL harus segera keluar.

Ke luar negeri adalah salah satu trend di DPR. Kegiatan ini lazim disebut sebagai studi banding atau kadang-kadang kunjungan kerja. Seorang staf ahli memberitahu saya bahwa anggota DPR periode ini (2004-2009) lebih sering

melakukan kunjungan ke luar negeri dibanding periode sebelumnya (1999-2004). Setiap anggota DPR bisa saja sampai 3 hingga 4 kali kunjungan luar negeri dalam setahun. Kunjungan luar negeri paling marak biasanya diselenggarakan pada akhir tahun. Seperti akhir tahun 2007 lalu, hampir separuh anggota DPR pergi keluar negeri pada akhir tahun itu.

Setiap pembahasan perundang-undangan seringkali diikuti kunjungan studi banding ke luar negeri. Setiap komisi juga punya jatah kunjungan ke luar negeri. BKSAP (badan kerjasama antar parlemen) juga punya jatah kunjungan kerja. Tapi yang paling sering keluar negeri adalah Badan Legislatif selanjutnya disebut Baleg. Untuk yang satu ini Ibu DD pernah berkata mengenai kelebihanannya terlibat dalam Baleg, satu, alat kelengkapan ini dianggap prestisius, bergengsi sebab Baleg adalah dapurnya perundang-undangan, di sanalah semua RUU dibahas terlebih dahulu sebelum masuk ke alat kelengkapan DPR lainnya seperti komisi atau pansus. Alasan kedua, Baleg lebih sering punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, dan ketiga, lebih banyak tambahan uangnya.

Tetapi urusan ke luar negeri, juga tak terbatas pada kegiatan kunjungan kerja. Ada juga pembiayaan negara bagi anggota DPR ke luar negeri bila yang bersangkutan mendapatkan undangan resmi untuk menjadi misalnya pembicara dalam forum internasional terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPR. Sayangnya akses untuk ini sangat tertutup. Seorang anggota DPR yang juga aktivis perempuan suatu kali mendapatkan undangan ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai parlemen Indonesia. Selama ini jika ia ke luar negeri atas undangan sebagai anggota DPR, ia selalu berangkat dengan biaya sendiri. Ia baru tahu saat itu ketika ia meminta tolong pada koleganya dari fraksi lain, ternyata keberangkatan ke luar negeri untuk memenuhi undangan itu dapat dibiayai oleh BKSAP. Sewaktu ia menelepon BKSAP untuk undangan ke Singapura sebagai perwakilan kaukus parlemen dan minta agar dibiayai BKSAP, staff BKSAP menjawab bahwa itu biasanya harus mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR, dan lebih biasa lagi hanya diberikan untuk anggota DPR se-fraksinya. Artinya bahwa yang mendapatkan akses untuk meminta pembiayaan atas undangan dari luar negeri adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar saja. Rupanya

pembiayaan negara untuk menghadiri undangan ke luar negeri merupakan akses tertutup, yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas di DPR.

Soal kunjungan luar negeri ini, banyak kalangan sering memprotes kunjungan luar negeri DPR, sebab kunjungan luar negeri ini dianggap memboroskan anggaran negara, belum lagi karena kebanyakan anggota DPR membawa pasangan mereka (suami atau istri) turut serta dalam kegiatan dinas ini. Untuk keberatan masyarakat karena membawa serta pasangan ke luar negeri ini, anggota DPR berkilah bahwa itu dilakukan dengan biaya sendiri. Yang dimaksud dengan biaya sendiri itu begini, dalam anggaran kunjungan kerja dinas itu dimasukkan anggaran uang saku yang cukup besar. Uang saku inilah yang dipakai untuk menutup ongkos suaminya. Mungkin jumlah besaran uang saku itu cukup untuk membiayai tiket pulang pergi suaminya. Itu mungkin saja, tetapi untuk berapa besarnya saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, seperti Ibu DD mengatakan kepada saya bahwa ia mensiasati tiket suaminya dari uang saku kunjungan dinas. Tetapi ini hanya satu contoh saja, bagi anggota DPR yang kaya, mungkin saja tidak menggunakan cara ini.

Ada satu hal yang saya tidak pernah mengerti adalah urgensi membawa serta pasangan dalam kunjungan studi banding keluar negeri, sebab bukankah tidak mungkin pasangan ikut serta dalam pertemuan resmi antar parlemen misalnya, atau pertemuan-pertemuan kenegaraan lainnya. Jawaban pertanyaan saya itu baru terbalas secara implisit dari cerita anggota DPR yang sekali itu membawa serta istrinya dalam kunjungan keluar negeri dengan alasan bahwa selama ini istrinya telah menahan diri selama bertahun-tahun hanya mendengar luar negeri dari cerita ibu-ibu istri anggota DPR saat arisan, jadi untuk sekali itu ia mengajak istrinya dengan biaya sendiri.

Tak semua anggota DPR suka kunjungan ke luar negeri. Yacobus Mayong Padang salah satunya, Yacobus adalah anggota DPR yang jarang ke luar negeri. Waktu ia masih menjabat sebagai pimpinan salah satu fraksi ia menolak untuk ikut ke luar negeri. Ia pernah mengatakan kepada saya bahwa ia mengusulkan kepada koleganya di saat partainya memenangkan pemilu 1999, agar menahan diri 2 tahun saja tidak ke luar negeri lalu konsentrasi dengan urusan perbaikan dalam

negeri. Atas usulan itu kolega-koleganya tidak merespon. Ketika ia menjadi sekretaris fraksi pada periode pemilu 2004 ini, ia memutuskan pada diri sendiri bahwa selama ia menjabat pimpinan fraksi ia menahan diri tidak ikut kunjungan ke LN.

Setelah turun dari jabatannya sebagai pimpinan fraksi, suatu hari saya mendengar bahwa ia pergi ke Belanda. Saya tergelitik untuk bertanya mengapa ia kemudian pergi ke Belanda. Saya bertanya ringan saja tentang kepergiannya itu. Ia menjawab sambil tertawa ringan, nadanya ramah sekali, jawabnya begini, "... pantas ya anggota DPR suka keluar negeri." Saya bertanya lagi mengapa anggota DPR suka keluar negeri, ia lagi-lagi malah menjawab "ya..pantas anggota DPR suka keluar negeri." Jawabannya penuh teka-teki buat saya yang sepertinya hendak mengatakan kepada saya bahwa kunjungan keluar negeri memang menyenangkan bagi anggota DPR. Pastilah menyenangkan, kalau tak menyenangkan bagaimana mungkin akhir tahun ini (2007) hampir separuh anggota DPR pergi ke luar negeri.

Lain kali saya menanyakan padanya via sms, kenapa anggota DPR senang sekali pergi ke luar negeri? Ia menjawab, "wah, mungkin bagi yang lain sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan dengan beragam versi. Nyatanya orang berebutan ke LN dan bahkan bisa menimbulkan konflik, tapi ke daerah-daerah marhaen orang gak berebutan dan tidak timbulkan konflik he..heeee." Saya mengerti, Yacobus mungkin saja termasuk pengecualian, saya tahu ia lebih suka pergi ke desa-desa pelosok bahkan pernah menempuh perjalanan ke pelosok desa di daerah pemilihannya hanya dengan jalan kaki berbekal tongkat dan mie kemasan bersama staf-stafnya. Kami pernah pula bersama-sama mengunjungi serikat tani di Jawa Tengah, naik kereta api, becak, dengan bus umum yang panas, sebelum akhirnya makan bakso di pasar yang ramai tanpa seorang pun mengenalnya sebagai anggota DPR.

Tapi lain Yacobus lain pula DD. Suatu hari saya sedang di ruangan kantornya bersama para staffnya. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka, DD masuk ruangan. Ia menegur asisten koleganya dan menanyakan ke mana anggota DPR yang diasistensinya. Rani menjawab, "Ini Bu mau keluar negeri."

"Ke mana ?"

"Hongaria, komisi Bu."

"Oh...Hongaria..Kapan? Komisiku ya kapan mau keluar negeri. Ini dekat puasa sich ya. Aku malah payah, ikut BKASP Portugal, komisiku juga Portugal. Aku nanti usul pindah tujuan aja, aku ganti yang ke Dubai aja."

DD melanjutkan, "Yang mahal *cost living*-nya itu ke Amerika ya..."

"Memangnya kenapa kalau mahal Bu," tanya saya. Dalam pikiran saya, mahal berarti membebani uang negara. DD sambil membelakangi saya, "anu...sisanya, sisa sakunya sedikit." Saya terdiam, setelah pintu ruangan dalam kantor DD tertutup, saya bertanya kepada Rani, berapa jumlah sisa uang saku kunjungan kerja ke luar negeri. Rani menjawab, "Ya sisa, bisa buat belanja. Rata-rata sekian dolar, yah kalau dirupiahkan ya sekitar 15 juta lah." Begitulah suatu kunjungan studi banding keluar negeri di mata seorang anggota DPR seolah adalah kunjungan biasa di mana anggota DPR boleh menunjuk tempat yang mau dikunjungi bergantian, bukan ke negara yang sama, dan mendapatkan sisa uang saku yang lumayan besar. Ini mungkin yang dimaksud dengan kunjungan yang menyenangkan itu.

Kunjungan keluar negeri diatur oleh sekretariat badan-badan DPR. Kadang-kadang malah sekretariat ini yang punya inisiatif untuk kunjungan keluar negeri, maklum setiap kunjungan selalu ada jatah untuk staf pegawai sekretariat ikut serta. Sekretariat inilah yang mengatur perjalanan termasuk penggunaan travel agen. Travel agen biasanya menyediakan paket-paket tertentu dalam perjalanan keluar negeri, termasuk kunjungan ke tempat wisata. Jadi di luar tempat-tempat tujuan kunjungan yang disepakati dalam rapat, sekretariat dan agen perjalananlah yang mengatur ke mana anggota DPR berada pasca pertemuan atau kunjungan resmi.

Seringkali anggota DPR yang pulang dari kunjungan luar negeri akan membagikan sejumlah oleh-oleh bagi kolega-kolega tertentu, asistennya, dan orang-orang lain yang dia kehendaki. Oleh-oleh itu dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian, tetapi dapat pula bermakna pemberitahuan bahwa yang bersangkutan baru saja berkunjung keluar negeri.

Gara-gara seringnya kunjungan studi banding ke luar negeri, maka baru-baru ini DD membuat kartu nama baru. Bila sebelumnya kartu nama hanya dibuat satu halaman yang di sana dituliskan lambang DPR, nama, komisi, fraksi, alamat dan telephone rumah dan kantor. Kadang-kadang disertai alamat email, entah email itu sungguh-sungguh digunakan atau tidak, sebab saya pun menjumpai anggota DPR yang mencantumkan email namun tak pernah dibuka sama sekali olehnya. Sekarang kartu nama dicetak lagi yang baru, bolak-balik, yang satu berbunyi dalam bahasa Indonesia, yang disebaliknya dengan menggunakan bahasa Inggris, tujuannya jelas untuk diberikan bagi koleganya dari luar negeri.

Selain soal kunjungan keluar negeri, anggota DPR punya suatu kegemaran yang lain. Pernahkah melihat sidang paripurna DPR? Dari kesekian kali mengikuti sidang paripurna DPR, saya baru kali ini memperhatikan bahwa ternyata hampir semua anggota DPR punya komunikator. Dari yang model lama sampai dengan model terbaru bertaburan di ruang sidang paripurna DPR.

Handphone dan komunikator adalah alat komunikasi. Tetapi dapat bermakna lebih dari sekedar urusan alat komunikasi saja. Kepemilikan terhadap suatu jenis handphone tertentu punya makna simbolik kelas. Yacobus, suatu hari memakai handphone komunikator, lalu ia menceritakan kepada saya kalau putrinya yang bungsu menyindirnya dengan mengatakan, "marhaen...marhaen." Maksudnya handphone itu mencirikan penggunanya berbeda kelas dengan kelas marhaen, kelasnya orang yang miskin, sebagaimana yang selalu dijadikan slogan bagi partainya. Padahal, sambil bisik-bisik Yacobus mengatakan kepada saya bahwa ia memakai handphone itu karena handphone lamanya rusak, komunikator yang ia gunakan pun bukan yang baru.

Handphone juga bisa menjadi pilihan pemberian bagi kolega sosial anggota DPR. Rekan kerja DPR yaitu birokrat pemerintah dapat menggunakannya sebagai pemberian untuk mengikat relasi sosial di antara ia (birokrat) pemerintah dengan anggota DPR. Seperti Ibu DD yang suatu kali menerima sebuah handphone baru dari koleganya di pemerintah. Harga handphone tersebut lebih dari 4 juta rupiah. Suatu harga yang mahal. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan trend handphone sekarang ini. Model yang sedang trend saat ini adalah

communicator terbaru dari nokia dengan garis merah di *casingnya*, seri *express the music*, kira-kira lebih dari 6 juta rupiah. Model ini yang sekarang sering saya lihat dimiliki anggota DPR.

Tak kurang dari Kompas (2006) pernah memuat berita foto hampir satu halaman di bagian halaman akhirnya, yaitu foto-foto handphone para anggota DPR di tengah sidang paripurna DPR. Handphone mahal yang serba canggih, bisa untuk nonton TV dan mengakses internet. Tentu saja handphone juga bukan sekedar alat komunikasi semata, lebih dari sekedar aspek fungsional, melainkan juga soal gengsi anggota DPR.

Selain komunikator, trend penggunaan teknologi yang juga ada adalah laptop. Seperti Ibu LN, ia saya lihat sering sekali membawa laptop ke ruangan sidang komisi, begitu masuk, duduk, ia langsung membuka laptop. Tak hanya Ibu LN tentu saja beberapa anggota DPR juga menenteng laptop ke dalam ruang sidang. Laptop yang sedang trend adalah laptop berukuran kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Tentu itu harganya jauh lebih mahal. Laptop banyak membantu urusan pekerjaan yang memerlukan mobilitas tinggi, apalagi bila laptopnya kian canggih, dilengkapi internal modem untuk mengakses internet di mana pun.

Tapi laptop juga urusan gengsi, seperti misalnya DD, ia mengatakan kepada saya bahwa bagi dia laptop yang pantas untuknya adalah laptop yang harganya di atas 10 juta rupiah. Padahal DD tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi itu. Di rumah ia berlatih dengan anaknya untuk menggunakan laptop. Ia juga gagap menyebut istilah dalam teknologi komputer seperti *soft file*, email dan sejenisnya. Saya yakin ia tidak mengerti mengenai teknologi komputer apalagi internet dengan baik, tapi ia tetap menyebutkan istilah-istilah itu dengan pengucapan yang salah, mungkin supaya dianggap ia tahu teknologi. Jadi laptop memang bukan sekedar alat fungsional melainkan soal gengsi dan kepantasan. Harga laptop disesuaikan dengan kepantasan harga bagi pembelinya yang merupakan anggota DPR. Laptop juga alih-alih soal kebutuhan dan kemampuan teknologi oleh penggunanya, melainkan juga soal *image* bahwa penggunanya adalah kalangan terdidik dan tak canggung dalam penguasaan

teknologi. Karena itu *image*, maka tak penting anggota DPR benar-benar dapat menggunakannya dengan baik atau tidak. Laptop sebagaimana juga handphone menjadi benda konsumsi yang disesuaikan dengan selera kelas penggunanya. Laptop juga menjadi kelengkapan atributif untuk memperkuat *image* bahwa penggunanya adalah anggota DPR, sebuah komunitas terdidik.

Kembali pada kategorisasi yang dibuat kawan saya di awal bab ini, mungkin ia akan mengatakan ini artinya SMP, sudah mulai pamer dengan kepemilikan barang-barang berharga yang trend dan mahal. Tapi kita memang tak perlu jauh-jauh melihat untuk dapat melihat gejala pamer itu, cukup dari ruang setiap anggota DPR saja. Misalnya surat undangan, seperti undangan dari DJ untuk pernikahan anaknya, undangannya warnanya putih, covernya sangat tebal dan pasti harganya mahal. Selain itu saya punya koleksi undangan pernikahan, undangan wayangan, hingga undangan sunatan anak. Hampir tak ada undangan yang bentuknya sederhana. Sebagian besar malah hampir seluruhnya berupa undangan yang sangat bagus, covernya tebal dan pasti sangat mahal untuk sebuah undangan. Kalau saya buka, sebagian besar acara resepsinya dilakukan di hotel besar, atau tempat yang menyewakan gedung dengan biaya mahal dan tempat tersebut terkenal.

Resepsi sunatan anak juga diselenggarakan di hotel berbintang. Saya pernah mewakili anggota DPR untuk datang pada resepsi sunatan anak seorang kolega DPR juga. Tempatnya di ballroom hotel *The Sultan*. Saya mengajak kawan saya untuk datang, sebab rasanya grogi sekali jika harus datang sendiri. Di depan tampak banyak karangan bunga tanda ucapan selamat, salah satunya yang terbaca adalah ucapan selamat dari Bupati Lampung berdampingan dengan karangan bunga dari kolega lainnya yang pastinya adalah orang kaya, pejabat tinggi daerah dan Jakarta.

Sebelum masuk *ballroom*, kami mengisi buku tamu sambil memasukkan sumbangan, maksud saya sumbangan dari anggota DPR yang saya wakili, setelah itu saya menerima souvenir. Begitu masuk ballroom, tempat duduk tamu terbagi dua. Deret di sebelah kanan adalah deret untuk para tamu vip yaitu kolega anggota DPR. Selain tempat duduk, sajian makanan juga ada dua meja, mengikuti deret

bangku duduk. Ibu NL dan keluarga, suami dan anak yang disunat duduk di kursi besar di sentral ruangan. Ia mengenakan baju dengan gaya model *little missy* yang lengannya menggelembung itu, lengkap dengan topi sebagai pengganti jilbab. Kami menyalaminya. Ia tersenyum tetapi tentu saja dia antara ingat dan tidak ingat pada saya. Setelah itu kami mengambil makanan, sadar bahwa rupanya status kelas pun ditempatkan berbeda sebagaimana penempatan *setting* tempat duduk dan makanan, jadi walau pun mewakili anggota DPR, saya bukan anggota DPR, maka saya dan kawan memilih duduk di deretan kiri dekat pintu masuk *ballroom*. Kami duduk sebentar, lalu kira-kira 45 menit kemudian, sambil basa-basi sedikit kami pamit pulang.

Tampaknya semua bentuk-bentuk kepemilikan barang-barang elektronik, handphone, laptop, serta acara pesta-pesta di tempat-tempat mewah, bukanlah soal yang fungsional melainkan suatu konsumsi yang ditempelkan pada kategori kelas tertentu. Konsumsi itu memang tidak fungsional melainkan sebagai bagian dari upaya menegaskan simbol kelas tertentu.

Tampaknya kita mesti kembali sejenak kepada penjelasan Bourdieu mengenai selera konsumsi, sebagaimana yang juga telah kita lihat pada bagian kedua ketika dijelaskan mengenai selera konsumsi berupa pilihan tempat makan. Tak ubahnya selera makan, selera membeli produk teknologi baik itu handphone, komunikator, laptop, dan undangan pesta terkait dengan soal selera konsumsi yang berbasis kelas. Konsumsi berbasis kelas ini memperlihatkan perbedaan kelas sosial dari suatu cara pandang yang lebih kultural dibanding penjelasan Bourdieu (1979) banyak menjelaskan soal selera konsumsi ini dalam bukunya "*Distinction*." Saya tak ingin mengulang penjelasan Bourdieu yang telah banyak saya ambil ketika menjelaskan selera konsumsi ini di bagian kedua. Yang penting diperdalam menurut saya justru adalah hubungan disposisi anggota DPR dalam memilih selera konsumsinya dengan ranah tempat mereka berada. Persoalan pilihan selera kelas memanglah benar, tetapi lebih jauh dari itu disposisi itu terkait dengan persoalan tindakan penyesuaian subjek dengan standar estetika kelas di dalam lingkungannya. Sebagaimana disampaikan salah satu informan mengenai kepantasan bagi dirinya untuk membeli laptop di atas harga 10 juta rupiah,

kepentasan ini adalah tindakan penyesuaian diri subjek dengan standar estetika kelas sosialnya. Di sinilah hubungan disposisi subjek dengan ranah, hubungan subjek dengan struktur dicerminkan. Subjek bukanlah suatu diri yang otonom, melainkan terikat oleh ranah tempatnya berada, sementara struktur juga tidak dapat melakukan dikte terhadap subjek sebab selera konsumsi adalah soal pilihan tindakan subjektif. Lalu bagaimana keduanya dapat berhubungan? Bourdieu menjelaskan hubungan subjek dan struktur dengan pendekatan yang relasional antara keduanya. Hubungan keduanya dijelaskan melalui *habitus*. *Habitus* adalah disposisi subjek, suatu kecenderungan yang merupakan hasil internalisasi struktur sosial. (Bourdieu, 1984: 468). *Habitus* adalah struktur kognitif yang memerantarai individu dengan realitas sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berurusan dengan realitas sosial. *Habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. (Takwim, Bagus, 2007: xviii). *Habitus* dapat terbentuk melalui hasil pembelajaran, pengasuhan, pendidikan, dan seterusnya, *habitus* bukanlah bawaan yang alamiah, namun karena adanya pengaruh intensi sejarah maka *habitus* menjadi seakan-akan alamiah.

Selanjutnya Bourdieu juga menjelaskan mengenai *habitus* sekaligus sebagai suatu skema klasifikatori, prinsip-prinsip pembedaan, mana yang dianggap baik atau buruk. (Bourdieu 1998: 8). Pada titik inilah menurut saya, Bourdieu sedang menjelaskan bahwa *habitus* juga merupakan cara baginya untuk menjelaskan mengenai bagaimana klasifikasi dan seterusnya standar kelas sosial itu dinyatakan, di mana ujung dari klasifikasi sosial itu adalah pembedaan diri dan kelompoknya dengan kelompok sosial lainnya yang dianggap lebih rendah. Selera berkait erat dengan dengan preferensi seseorang terhadap objek budaya yang dipilihnya. Di balik pilihan itu tersimpan upaya membedakan diri dari orang lain atau kelompok sosial. Pembedaan diri tidak terjadi alamiah, melainkan merepresentasikan kelas sosial tertentu dalam hirarki kekuasaan. Mereka yang menempati posisi dominan membedakan dirinya untuk menampilkan selera yang sah dan cenderung menganggap rendah mereka yang berada di posisi bawah. Dalam "*Distinction*," Bourdieu (1984) berkesempatan memperlihatkan

mekanisme dominasi dalam praktek selera dan gaya hidup. Masing-masing kelas sosial menampilkan kecenderungan (disposisi) mereka dalam menilai, mengklasifikasi kelompok sosial di luar kelasnya. Selera pada akhirnya memproduksi klasifikasi antara kelas populer dengan kelas dominan, antara baik atau buruk.

Mungkin kata penyesuaian adalah kata yang tepat untuk mewakili gambaran maksud anggota DPR membeli laptop yang pantas bagi dirinya, atau barang elektronik mahal lainnya maupun pesta-pesta di hotel mewah. Tindakan anggota DPR tersebut adalah disposisi anggota DPR yang tidak alamiah dan juga otonom namun juga tidak didikte oleh struktur, melainkan sebagai tindakan subjek yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jelas pula bahwa selera konsumsi itu selain ditujukan untuk menyesuaikan standar kepantasan anggota DPR di dalam lingkungan sosialnya, sekaligus pada saat yang sama juga melakukan klasifikasi pembedaan terhadap subjek lain yang berada di luar kategorisasi diri dan kelompok sosialnya.

Tingkat yang terakhir dalam definisi kawan saya adalah SMU, sudah main uang. Menurut pandangan awam, anggota DPR selalu identik dengan uang banyak. Disini saya akan jelaskan soal uang-uang itu sejauh yang saya tahu. Pertama, uang anggota DPR itu diperoleh dari gaji sebagai anggota DPR, jumlahnya tak banyak dibanding pejabat pemerintah atau gaji swasta lainnya. Kira-kira sebesar 16 juta. Itu akan dipotong dengan iuran fraksi, masing-masing fraksi berlainan besaran potongan gajinya. Ada yang dipotong 5 juta per bulan, ada yang lebih besar dari itu. Khusus untuk uang gaji ini setiap anggota DPR diberikan slip gaji yang disampaikan kesetjengan DPR ke ruang-ruang anggota melalui surat. Uang yang kedua adalah uang tunjangan yang biasanya dikirimkan dalam bentuk rekening uang di Bank Mandiri. Setiap anggota DPR selalu otomatis dibuatkan rekening di Bank Mandiri Cabang DPR/MPR. Tunjangan ini macam-macam, tunjangan komunikasi, tunjangan rumah, dan lain-lain. Uang sidang seperti yang sering dihebohkan orang setiap kali sidang selalu diberi amplop, itu tidaklah benar. Anggota DPR tak mendapatkan uang setiap kali sidang.

Di luar gaji dan tunjangan uang yang lazim diterima adalah uang konsinyering. Bila ada persoalan penting yang perlu pembahasan intensif atau bila ada RUU yang penting untuk segera dibahas di luar hari-hari sidang di DPR. Biasanya Sabtu-Minggu digunakan untuk pembahasan perihal penting tersebut, bertempat di KOPO, daerah Puncak, suatu kompleks villa khusus DPR yang digunakan untuk konsinyering-konsinyering. Untuk setiap kali konsinyering itu ada uang tambahan. Pembahasan RUU di luar DPR seperti misalnya diselenggarakan di hotel tertentu, juga pasti mendapatkan uang tambahan. Yang ini biasanya disepakati mekanismenya bersama antara DPR dan pemerintah dalam hal ini departemen terkait. Biasanya sudah dipatok dalam anggaran pembahasan RUU. Biaya pembahasannya disiapkan oleh pemerintah. Uang tambahan lainnya didapat bila suatu RUU selesai dibahas. Jumlahnya kurang lebih Rp 5 juta rupiah untuk 1 RUU, diberikan diakhir pembahasan UU. Masa pembahasan 1 RUU tak selalu sama, ada RUU yang bisa dibahas dalam waktu 6 bulan, ada RUU yang sampai akhir masa periode jabatan tak segera selesai dibahas. Yang heboh saat ini adalah RUU pemekaran daerah, kalau sekali keputusan pemekaran itu ada 5 saja daerah pemekaran dan setiap 1 daerah pemekaran itu 1 UU, itu artinya anggota DPR dapat penghasilan bersih 5 dikalikan 5 juta. Itu kalau 5 daerah, nah Komisi II kalau tidak salah selama pembahasan daerah pemekaran secara keseluruhan membahas kurang lebih 36 RUU. Silakan hitung saja. Selain itu, setiap masa reses anggota DPR juga mendapatkan uang reses namanya. Dulu hanya uang itu saja yang diterima untuk reses, namun kini ada penambahan, selain uang reses yang besarnya tergantung dari jauh-dekat lokasi daerah pemilihan mereka, anggota DPR juga mendapatkan uang penyerapan aspirasi sebesar Rp 4,5 juta x 7 kegiatan. Tambahan-tambahan lainnya juga akan didapat dari badan-badan kelengkapan DPR yang diikuti anggota DPR. Misalnya BURT (badan urusan rumah tangga) adalah badan yang paling sering melakukan konsinyering untuk pembahasan anggaran DPR, Baleg adalah badan bergensi lainnya, yang selain merupakan dapurnya RUU, juga dikenal sebagai badan yang sering konsinyering untuk pembahasan harmonisasi RUU dan juga pergi ke luar negeri untuk studi

banding RUU. Uang lainnya lagi adalah uang sisa kunjungan kerja komisi di dalam negeri, uang sisa kunjungan luar negeri.

Itu semua honor bersih yang dianggarkan negara. Tetapi ada juga uang lain, uang pertemuan dengan pemerintah di luar sidang Senayan (Milal, Zainul AM, 2004), yang lain salah satunya adalah uang kutipan dari daerah. Biasanya yang pintar main yang dapat. Alasannya banyak, salah satu misal adalah untuk kebutuhan tim pembahas RUU tertentu. Atau uang *fee* karena membantu daerah mendapatkan kucuran dana APBN untuk daerah tertentu. Biasanya daerah yang mendapatkan dana ini memberikan sejumlah *fee*, sebagai ucapan terima kasih. Soal uang di DPR ini soal sensitif yang sebenarnya 'tst', tahu sama, tahu, demikian ungkap salah seorang aspri yang sering mendapatkan cerita dari anggota DPR yang ia bantu dan sesekali mendapatkan cipratan dana terima kasih itu.

Buku dan Sekolah

Saya punya kumpulan buku-buku yang disusun anggota DPR. Isinya macam-macam. Kadang saya menemui satu dua buku yang sama di Gramedia, tetapi lebih sering buku-buku tersebut beredar terbatas di lingkungan DPR. Saya menduga bahwa menyusun buku saat ini adalah salah satu trend baru. Ada anggota DPR yang menyusun buku dengan serius, berisi laporannya kepada rakyat mengenai kinerjanya selama beberapa tahun di DPR. Tetapi ada juga anggota DPR yang memasang seluruh anggota keluarganya di cover depan buku yang disusunnya. Satu dua buku saya jumpai menggunakan kertas eksklusif yang halus dan tebal. Tak jarang buku-buku tersebut hanya sedikit tulisannya, selebihnya adalah tulisan orang lain, atau buku itu berisi hanya kumpulan puisi saja. Lupa menulis banyak-banyak isi pikirannya dan lebih banyak memperkenalkan anggota keluarganya, asal-usulnya, dan sedikit kiprah-kiprah yang telah dibuatnya. Anggota DPR perempuan juga ada yang menyusun buku, di cover depan ada gambar dirinya, berpose bak artis. Di bagian sampulnya dituliskan bahwa yang bersangkutan sempat bersekolah di luar negeri. Terlihat bagus sekali riwayat hidupnya di sampul itu. Begitu membuka halaman berikutnya dan berikutnya lagi hingga tiba di bagian isi, ternyata anggota DPR

yang bersangkutan menulis hanya satu artikel sangat pendek saja. Selebihnya saya hanya mendapati tulisan orang-orang lain yang dikumpulkan dan kemudian disusun begitu saja.

Dugaan saya buku tersebut tidak disusun sendiri, melainkan disusun oleh pihak-pihak lain. Memang di DPR ini banyak penawaran untuk menuliskan buku atau tampil dalam majalah eksklusif yang tak jelas kontinuitas terbitnya. Penawarannya melalui brosur-brosur, kadang juga berdering telephone yang meminta janji wawancara tetapi buntutnya meminta uang untuk penerbitannya. Satu buku sekian juta tarifnya, satu profile dalam majalah eksklusif sekian kontribusinya. Seperti pertanyaan saya pada staf dari Ibu NL yang telah menerbitkan sebuah buku, apakah Ibu punya tim penyusun buku, mereka mengiyakan. Ketika saya bertanya lebih jauh, berapa biaya untuk tim penyusun bukunya, mereka memasang wajah penuh makna. Tidak menjawab. Saya pun mengerti mereka 'susah' menyebutkan angka, sepertinya itu rahasia.

Buku yang disusun anggota DPR jarang beredar luas atau sangat sulit saya temui di toko-toko buku. Dugaan saya buku tersebut memang beredar terbatas saja. Sehingga buku memang tidak dimaksudkan sebagai komunikasi kepada publik luas, melainkan dimaksudkan untuk media komunikasi terbatas di antara anggota DPR dengan konstituennya di daerah atau media komunikasi vertikal terbatas kepada kolega-kolega politiknya dan elite partai yang bersangkutan. Dengan buku itu ia ingin menempatkan dirinya di dalam komunitas politik yang terdidik dan membuat citra terdidik itu menempel pada dirinya. Buku juga dapat menjadi media mempopulerkan dirinya pada komunitas politik di Senayan. Di sini buku merupakan simbol yang memperkuat eksistensi dan upaya mendapatkan pengakuan sebagai anggota di dalam komunitas politik yang terdidik.

Selain buku, majalah juga pilihan untuk mempopulerkan diri. Saya juga memiliki kumpulan majalah-majalah yang covernya dipenuhi wajah anggota DPR tertentu. Sekali waktu majalah biasa, tak jarang majalah eksklusif. Tak selalu soal substansi politik, sekali-sekali muncul dalam soal gaya baju, dan hal-hal yang bersifat sosialita. Dan sebagaimana juga buku, untuk tampil di majalah tertentu,

banyak penawaran datang ke meja anggota DPR, tentu dengan sejumlah keharusan kontribusi uang.

Selain buku dan majalah sebagai simbol anggota komunitas terdidik, sekolah juga sering kali difungsikan demikian. Sekolah identik dengan titel yang disandang di depan atau belakang nama anggota DPR. Titel menyimbolkan keterlibatannya sebagai suatu anggota komunitas terdidik di DPR. Sehingga tak jarang anggota DPR berlomba-lomba sekolah lagi.

Seperti ND, titel di belakang namanya adalah SH, sarjana hukum dari kampus yang saya pun baru sekali itu mendengar namanya. Menurut sumber-sumber di partainya, sebelum menjadi anggota DPR ia seringkali menjadi MC pada kegiatan partai. Ia memiliki hubungan dekat dengan petinggi partai, lalu ketika pemilu 2004 berlangsung dia menjadi caleg dari daerah pemilihan yang 'gemuk' bagi partainya. Maka tanpa kesulitan berarti ia pun melenggang masuk ke parlemen.

Suatu hari, ia meminta kepada asistennya untuk menggantikannya mengerjakan ujian masuk S2 sebuah kampus negeri di Jakarta, alias menjadi joki. Asistennya sangat kesal sehingga dengan sengaja membuat ulah agar dikeluarkan dari ujian. ND lalu mengambil studi S2 di Universitas Terbuka jurusan MAP (magister administrasi publik). Ia jarang kuliah, semua tugas kuliah menjadi pekerjaan tambahan bagi asistennya. Asistennya mengeluh panjang lebar kepada saya, lalu saya menanyakan kepadanya untuk apa 'Bos'-nya kuliah kalau tidak pernah masuk dan memberikan tugas kepadanya. Dengan cepat ia menjawab bahwa tentu saja motivasi dari cara sekolah seperti ini tiada lain adalah soal gelar di belakang nama. Gelar itu melengkapi statusnya sebagai anggota DPR, tak cukup dengan SH, maka ND pun hendak melengkapinya dengan gelar master.

Tak asing lagi perdebatan mengenai tingkat pendidikan sebagai prasyarat masuk di dalam bursa jabatan politik. Untuk menjadi Bupati sampai Presiden, dipersyaratkan tingkat pendidikan akademik. Kapasitas politik direduksi menjadi stempel akademik. Tidak ada standar soal kepedulian mengenai nasib rakyat, melainkan bergeser menjadi kapasitas intelektual yang lagi-lagi jatuh pada soal simbol stempel akademik. Tak heran bila kemudian para politisi pun berlomba

mengejar gelar di belakang namanya untuk mencitrakan dirinya sebagai bagian dari komunitas terdidik yang masuk dalam kriteria persyaratan bursa jabatan politik, dibanding bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan kredit point di mata rakyat.

Wajar bila buku, majalah, dan bahkan sekolah di dalam ranah komunitas politik ini keluar dari kerangka kelaziman yang seringkali kita mengerti. Buku, majalah, dan sekolah keluar dari pakemnya sebagai sarana desiminasi pemikiran atau upaya memperoleh pengetahuan, atau meningkatkan kapasitas diri, melainkan berubah menjadi sesuatu yang memiliki makna simbolik yang dianggap berarti dalam memperoleh pengakuan citra diri terdidik serta memperkukuh eksistensi dalam komunitas politik di Senayan.

Mobil

Kalau melintasi lantai parkir, sudah pasti di sana berderet-deret jenis mobil, seperti sebuah *show room* mobil. Berbagai jenis mobil ada di sana, tentu saja termasuk mobil-mobil mewah. Mobil juga punya trend. Setahun lalu *kingsroad terrano* menjadi trend, lalu saat ini *harrier* menjadi trend baru, dan selanjutnya saya yakin beberapa waktu kemudian juga akan tergeser kedudukannya sebagai trend. Yang jelas saat ini model mobil-mobil besar sedang jadi trend.

Seperti juga *handphone* dan *laptop*, kepemilikan mobil pun tidak fungsional. Suatu hari seorang staff ahli sebuah fraksi mengeluhkan pimpinan fraksi yang baru. ia lalu menirukan kata-kata pimpinan fraksi tersebut yang disampaikan terbuka dalam rapat dengan para staff ahli, "Saya malu, gengsi dengan pimpinan fraksi partai lain, jadi saya langsung beli mobil baru, *cash!*" Mobil baru yang dimaksud itu adalah mobil *harrier* yang harganya ditaksir di atas Rp 800 juta rupiah.

Mobil menjadi bukan lagi persoalan kebutuhan fungsional transportasi melainkan juga soal gengsi kelas tertentu. Selain soal selera konsumsi kelas, *harrier* yang harganya tentu sangat mahal sekalipun bagi anggota DPR bila kita melihat perbandingannya dengan gaji sebagai anggota DPR, tentu punya makna

lebih dari itu. Menurut saya si pemilik *harrier* tak hanya sedang menunjukkan selera kelasnya atau sekedar melakukan penyesuaian dengan standar sosialnya, melainkan ia secara simbolik menampilkan kekuatan modal materialnya atau kekayaannya. Hanya orang yang sangat kaya dapat membeli *harrier* baru dengan cara tunai atau *cash*.

Penampilan kekayaan secara simbolik melalui kepemilikan mobil mewah tak tak semua anggota DPR dapat memilikinya sekaligus merupakan upaya bagi dirinya untuk menempatkan dirinya lebih dibanding anggota DPR pada umumnya. Ketika itu maka ia sekaligus bermaksud membuat perbedaan posisinya dengan kolega politiknya yang tidak memiliki modal kekayaan sebesar dirinya.

Sekaligus ketika ia menjadi pimpinan fraksi baru, ia menampilkan kekayaannya. Ia mengakumulasi kedudukan politiknya sebagai pimpinan fraksi baru dengan kekayaan. Kepemilikan mobil *harrier* juga ditempelkan dalam status politiknya sebagai pimpinan fraksi di hadapan pimpinan fraksi partai lainnya, seakan ia sedang berusaha memposisikan dirinya di hadapan komunitas politiknya agar mendapatkan pengakuan kesejajaran dengan elite fraksi-fraksi lainnya.

Jaringan Sosial

Wierdaningsih (2002), menuliskan suatu kajian mengenai proses rekrutmen politik politisi perempuan di DPR RI. Dalam tulisannya itu pada dasarnya Wierdaningsih memperlihatkan bahwa para perempuan politisi memiliki faktor pendukung yang mereka gunakan dalam memperoleh dan selanjutnya mempertahankan posisi politiknya di parlemen. Faktor pendukung yang ia maksudkan secara sederhana saya petakan ulang dalam dua bentuk, yang pertama adalah kapasitas individual yang bersangkutan, baik pengalaman politiknya yang panjang, aktivitas organisasi, perilaku, kekayaan, serta citra diri di hadapan masyarakat luas, dan faktor kedua adalah adanya unsur jaringan sosial yang terajut bersama aktor yang bersangkutan. Jaringan sosial yang teridentifikasi oleh Wierdaningsih (2002), adalah hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan dan ikatan primordial (agama dan ras).

Identifikasi Wierdaningsih (2002), mengenai jaringan sosial yang dipergunakan politisi perempuan dalam parlemen untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, saya temukan juga berlaku tak hanya bagi anggota DPR perempuan, terhadap semua anggota DPR malah, jaringan sosial punya pengaruh.

Hubungan kekerabatan dengan elite partai menentukan posisi anggota DPR, baik di dalam partai dan berimplikasi juga di dalam keberadaannya di parlemen. Hubungan kekerabatan ini bahkan di partai tertentu yang karakter partainya masih paternalistik, sangat menentukan, dan karenanya aktor-aktor penyandang hubungan kekerabatan ini menampilkannya secara terbuka.

Anggota DPR yang tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan elite partai, saya jumpai, mereka memiliki latar belakang hubungan kekerabatan melalui suami atau istri kepada elite. Di FPKB, saya lihat sebagian besar anggota DPR fraksi tersebut memiliki hubungan kekerabatan baik langsung maupun melalui istri atau suaminya dengan Kyai. Kyai adalah kedudukan sosial yang dianggap sangat penting dan memiliki pengaruh terhadap kepartaian.

Demikian juga dengan ikatan primordial, agama dan ras, secara khusus, fenomena ini terlihat nyata di Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya disingkat FPDI Perjuangan. PDI Perjuangan sebagai partai fusi memiliki keistimewaan dengan komposisi konstelasi politik internalnya. Ikatan primordial mendapatkan tempat di partai fusi yang plural ini. Ikatan primordial seperti Kristen Batak, bukanlah semata-mata menjadi ikatan primordial belaka, melainkan mengental menjadi suatu faksun politik internal.

Selain hubungan kekerabatan dan ikatan primordial, jaringan sosial lainnya yang ada adalah jaringan sosial yang berdasarkan keterlibatannya dalam organisasi tertentu di masa lalu maupun saat ini. Kadang-kadang organisasi itu adalah ikatan alumni organisasi kemahasiswaan, seperti alumni GMNI, alumni HMI, alumni PMII, alumni UGM, alumni ITB lain-lain. Jaringan sosial lainnya adalah hubungan dengan organisasi berbasis massa, boleh jadi organisasi berbasis massa yang berafiliasi pada partai tertentu atau pun tak berafiliasi pada partai

secara terbuka. Misalnya KNPI, Nahdatul Ulama, organisasi buruh, organisasi tani, dan lain-lain.

Misal SM, ia adalah alumni dari PMII, berlatar belakang wartawan, lalu AG, alumni GMNI, berlatar belakang aktivis gerakan sosial di masa muda, ada FN berlatar belakang ketua ormas partai, sementara FB merupakan alumni HMI.

Keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan di masa muda, misalnya, seringkali lama-kelamaan menjadi suatu pelabelan simbolik. Tidak selalu soal kepentingan yang terus-menerus seiring atau visi perjuangan yang sama, tetapi menjadi pelabelan *de corps*.

Keterlibatan anggota DPR dalam organisasi alumni juga seringkali mempengaruhi hubungan-hubungan pertemanan politik yang terjalin, bahkan tak jarang mengental menjadi sebuah fatsun politik tertentu. Dengan demikian seringkali terjadi pengelompokan berdasar keterlibatan atau hubungan dalam jaringan sosial tertentu. Tak selalu soal kepentingan jangka pendek yang membuat pengelompokan, atau kepentingan pragmatis lainnya, pengelompokan fatsun politik juga dapat terjadi karena faktor kepentingan visi bersama suatu kelompok jaringan sosial atau bahkan kepentingan tujuan ideologis tertentu.

Pelabelan kelompok mempengaruhi fatsun politik, karena itu kadangkadangkang anggota DPR tertentu berusaha memperoleh pengakuan pelabelan kelompok tertentu agar dirinya dapat diterima kelompok mayoritas dalam fraksi. Misalnya GJ, karena ia berada di fraksi yang mayoritas nasionalis, ia berusaha memperoleh pengakuan label sebagai alumni mahasiswa nasionalis. Ia seringkali memberikan bantuan pendanaan kegiatan GMNI dan sekaligus meminta penyelenggaranya memberinya kesempatan menjadi pembicara. PB, misalnya ia adalah alumni HMI MPO, karena di fraksinya mayoritas adalah HMI DIPO, maka ia mulai mendatangi pertemuan halal bi halal yang dilaksanakan alumni HMI DIPO. Saya mengingat Tsing, Anna dalam *The Diamond Quenn* (1998, 123), di mana ia menyebutkan,

”Orang Banjar menggunakan stereotip tentang orang Dayak yang biadab ketika mereka bepergian ke Jawa. Mereka bilang bahwa mereka datang dari

Kalimantan, sehingga semua orang ketakutan. Mitos tentang kebiadaban orang Dayak yang pemburu kepala, selalu menjadi senjata yang strategis.”

Secara implisit Tsing menunjukkan bahwa identitas itu diciptakan, bukan sesuatu yang *given*, melainkan dapat diciptakan oleh aktor yang bersangkutan bahkan pula dapat direayasa dan dimanipulasi. Identitas menjadi suatu pelabelan sosial yang ditempelkan pada diri yang bersangkutan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan penerimaan dari komunitasnya. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh GJ dan juga PB yang sedemikian rupa berstrategi mendapatkan pelabelan *de corps* dari suatu kelompok yang lebih dominan dalam lingkungannya.

Jaringan sosial lainnya, adalah hubungan pertemanan. Hubungan ini tentu tak sekedar hubungan pertemanan biasa, melainkan sedapat-dapatnya merupakan hubungan pertemanan dengan aktor-aktor yang memiliki kedudukan politik yang kuat atau bahkan aktor yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan elite partai. ND memiliki kedekatan khusus dengan orang yang dekat dengan elite partai. Ia kini juga berusaha mendekati anak dari pemimpin partai. Saya mendapati foto bersama antara ND dengan anak ketua umum partai. Itu hanya salah satu cara, tentu saja ada banyak cara lain untuk membuat hubungan pertemanan yang berarti dalam ranah politik ini.

Kedekatan hubungan dengan elite itu perlu ditunjukkan secara terbuka kepada banyak orang. Sebenarnya kita dapat melihat kedekatan hubungan itu dari hal sederhana saja, yaitu foto atau gambar. Di ruangan kantor anggota DPR, terutama Fraksi PDI Perjuangan sebagian besar pasti memasang gambar dan atau foto Soekarno dan Megawati. Di ruang kantor beberapa anggota DPR fraksi ini malah dipajang foto-foto bersama anggota DPR yang bersangkutan dengan tokoh petinggi partai terutama Megawati dan Taufiq Kiemas.

Di ruang Ibu TS, anggota DPR perempuan yang vokal dan pernah sangat populer di era lalu, dipajang tak hanya satu foto bersama dirinya dan Megawati. Foto itu seakan-akan menunjukkan adanya hubungan kedekatan TS dengan Megawati. Begitu pula di ruangan DJ. Memang sudah rahasia umum bila antara DJ dengan Megawati punya hubungan dekat. Diperkuat dengan foto-foto bersama

antara keduanya. Di ruangan ND yang tertata apik dan rapi dipajang di meja sehingga semua orang yang masuk ke ruangnya pasti akan melihat foto bersamanya dengan Taufiq Kiemas, keduanya sedang tersenyum. Jadi foto-foto itu berbicara melebihi kenyataan sekedar irisan peristiwa semata, melainkan mengundang penafsiran lain yaitu simbol kedekatan hubungan antara yang bersangkutan dengan elite partai. Foto itu dipajang di meja, diletakkan pada dinding ruangan, dimaksudkan untuk memperlihatkan pada orang lain yang masuk ke dalam ruangan, sehingga foto bukanlah sekedar kenangan pribadi, tetapi justru ditujukan ke hadapan publik.

Selain itu anggota DPR juga harus membuat hubungan dengan pimpinan partai terutama DPP. Minimalnya rajin menunjukkan muka dalam kegiatan partai dan sedikit banyak menyumbang pembiayaan kegiatan partai. Hampir semua anggota DPR sadar bahwa hubungan dengan DPP sangat menentukan masa depan keberlanjutan karir politiknya. Mereka melakukan segala upaya untuk mendekati diri kepada DPP, baik dengan memberikan kontribusi pendanaan dengan segala bentuk sampai pun rajin-rajin unjuk muka. Seperti ND, tidak penting terlibat serius atau tidak dalam kepanitiaan kegiatan partai, yang penting rajin menunjukkan muka. Sampai-sampai ia bersedia membawakan baki untuk pemukul gong yang akan digunakan ketua umum partai untuk membuka acara partai. Sebegitu rupa upaya ND dalam membuat DPP Partai menyadari kehadirannya.

Sidang DPR

Sidang adalah aktivitas utama anggota DPR. Anggota DPR dipilih ya memang untuk bersidang. Sebagai pengetahuan umum saja, sidang di DPR ada banyak macamnya. Pertama adalah sidang paripurna DPR RI. Sidang ini adalah forum pengambilan keputusan politik tertinggi. Selain itu DPR dilengkapi pula dengan alat-alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan adalah komisi, panitia khusus pembahasan undang-undang tertentu, badan legislatif, dan panitia anggaran.

DPR RI memiliki 11 komisi, yaitu komisi I menangani masalah terkait pertahanan dan keamanan, komisi II menangani masalah aparaturnya pemerintahan, pertanahan, otonomi daerah, sekretariat kabinet, sekretariat negara, komisi III menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, komisi IV menangani masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, komisi V menangani masalah transportasi, komisi VI menangani masalah perdagangan, komisi VII menangani masalah sumber daya alam termasuk pertambangan, komisi VIII menangani masalah kesejahteraan sosial dan perempuan, komisi IX menangani masalah ketenagakerjaan, komisi X menangani masalah pendidikan, komisi XI menangani masalah keuangan. Masih ditambah dengan panitia anggaran.

Selain komisi masih ada badan-badan lain yang merupakan alat kelengkapan DPR pula, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Legislasi (Baleg), Badan Musyawarah (Bamus). Kemudian ada pula panitia-panitia khusus yang membahas RUU tertentu yang keanggotaannya lintas komisi seperti pansus RUU Politik, pansus RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, atau pansus untuk persoalan penting lainnya, seperti pengawasan bencana Yogya dan Jawa Tengah, Lapindo, dan lain-lain.

Di dalam masing-masing alat kelengkapan itu, terutama untuk komisi ada juga tim kerja tertentu yang dibagi berdasar hubungan kerja komisi dengan pemerintah. Misal di komisi II, ada tim kerja (timja) otonomi daerah, timja tanah, timja aparaturnya negara. Timja otonomi daerah banyak menangani isu terkait otonomi daerah bersama dengan Depdagri. Timja tanah banyak berhubungan dengan BPN untuk kasus-kasus tanah, dan timja aparaturnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan birokrasi pemerintahan bersama dengan Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara.

Di setiap alat kelengkapan terdapat pula berbagai macam jenis sidang yaitu sidang pleno komisi dihadiri semua orang anggota komisi, rapat dengan pendapat umum (RDPU), rapat kerja komisi, rapat panitia kerja (panja). Sementara itu dalam setiap pembahasan undang-undang ada sidang paripurna

komisi, sidang panja RUU, dan sidang tim perumus RUU. Kecuali Bamus, yang hanya bersidang untuk menentukan jadwal pembahasan dalam paripurna DPR.

Setiap anggota DPR pasti terlibat dalam satu alat kelengkapan DPR, dalam hal ini komisi. Di luar itu, anggota DPR tertentu juga dapat ikut dalam alat kelengkapan selain komisi, seperti badan legislasi (baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Anggaran, atau pansus-pansus. Keikutsertaan di alat kelengkapan lain dan pembahasan undang-undang tertentu dapat dilakukan bersamaan.

Demikianlah, bahwa banyak sekali anggota DPR yang mengikuti berbagai persidangan dalam satu waktu sekaligus. Seperti Ibu NK, dalam suatu masa sidang tertentu ia merupakan anggota komisi II, anggota pansus RUU, serta anggota Baleg. Kadang ia mesti hadir dalam sidang komisi beberapa menit, tanda tangan, lalu ikut sidang baleg, lalu pindah lagi ikut sidang RUU. Semua yang paling penting adalah tanda tangan kehadiran, sebab itu urusannya dengan laporan pada fraksi dan badan kehormatan DPR. Perkara bahwa hadirnya cuma satu menit, atau bahkan menitipkan tanda tangan, itu soal lain. Sebenarnya mungkin saja menghadiri semua pembahasan RUU secara penuh, persoalannya seringkali jadwal sidang satu sama lain berbenturan.

Nah urusan tanda tangan ini ada pula ceritanya. Adakalanya agenda rapat-rapat para anggota DPR itu berbarengan, dulu ketika masih banyak pansus-pansus dan badan-badan, dalam sehari bisa 3 bahkan sampai 4 agenda berhimpitan waktunya, jadilah para anggota DPR itu akan pindah dari satu sidang ke sidang lain, aliasnya mereka ya hanya numpang absen dan hanya ikut dalam sidang yang mereka memang konsen. Tapi adakalanya juga anggota DPR itu pergi dari luar kota, baru datang dan tidak ikut sidang atau sudah sangat terlambat, ia pun hanya akan numpang absen. Adakala pula yang sangat sibuk, hanya akan absen lalu pergi. Nah itu soal sekedar absen. Ada pula jenis lain berhubungan dengan absensi, yaitu menitipkan pada aspri untuk tanda tangan. Bukan sekali dua hal ini saya temui. Para staff itu sudah menghapal model tanda tangan Ibu atau Bapaknyanya. Merekalah yang datang untuk absen. Ada pula bentuk menitipkan absen pada staff komisi seperti yang dilakukan oleh Ibu tadi. Bentuk lain soal

absen adalah menunda absen, misalnya karena ia masih di luar kota dan tidak datang rapat, ia akan meminta staff komisi untuk tidak buru-buru menyerahkan daftar absen atau mencoret kolom atau memberi keterangan dalam kolom yang bersangkutan. Kadang 1 atau 2 hari setelah rapat itu barulah ia tanda tangan absensi rapat. Bentuk yang terakhir adalah surat ijin. Jikalau keluar kota ada alasannya, atau rapat penting yang bisa dijadikan alasan, maka dibuatlah surat ijin yang diurus oleh staffnya. Para staf telah menyimpan banyak surat ijin yang sudah ditandatangani banyak-banyak sebelumnya. Hanya dalam rapat fraksi, anggota DPR tidak berani menitipkan absensi, mereka akan memilih membuat surat ijin.

Keterlibatan dalam berbagai alat kelengkapan sekaligus menandakan bahwa anggota DPR yang bersangkutan adalah anggota DPR yang aktif, berguna bagi fraksi, pokoknya dianggap penting. Karenanya seringkali keterlibatan dalam lebih dari satu alat kelengkapan dianggap bergengsi atau setidaknya yang bersangkutan dianggap memiliki status yang lebih dibanding anggota DPR pada umumnya.

Apalagi bila alat kelengkapan yang dimana anggota DPR terlibat adalah alat kelengkapan yang vital dan karena dianggap bergengsi. Alat kelengkapan itu misalnya adalah Baleg. Dianggap vital karena merupakan dapurnya produk perundang-undangan. Semua RUU inisiatif DPR harus digodok terlebih dahulu di Baleg. Baleg juga dikenal bergengsi karena yang terlibat didalamnya dianggap orang-orang yang memiliki bekal pengetahuan dan intelektual yang cukup baik di antara anggota DPR lainnya. Badan ini juga dianggap bergengsi bukan saja karena dapurnya RUU atau orang-orang cerdas di dalam, tetapi juga karena sering melakukan kunjungan studi banding keluar negeri.

Alat kelengkapan lain yang juga bergengsi adalah Panitia Anggaran, sebab di sanalah semua anggaran negara dibahas. Pansus RUU juga dapat bergengsi terutama bila itu merupakan pansus yang politik dan sangat terkait dengan kepentingan partai-partai. Pansus yang saat ini sangat vital adalah pansus semua RUU paket politik, yaitu pansus yang membahas RUU Partai Politik, RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk), RUU Pemilu, RUU Pemilihan Presiden. Hanya anggota DPR yang punya kapasitas politik yang tinggi, kemampuan

bersilat kata, berargumentasi, menggiring wacana dalam persidangan, bernegosiasi, atau pengalaman politik yang mumpuni, yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi untuk masuk sebagai anggota pansus RUU paket politik. Kepada mereka itulah fraksi memberikan mandat untuk memperjuangkan kepentingan partai yang sangat vital dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka bahkan boleh dibilang sebagai pentolan partai, ujung tombak kepentingan partai. Oleh karena itu keterlibatan dalam RUU paket politik dianggap sangat bergengsi, prestisius.

Karena prestisius itu maka anggota DPR yang terlibat di dalamnya menjadi sangat serius mengikuti pembahasan. Walau pun demikian, tak semua dari mereka yang terlibat pembahasan adalah orang yang boleh memutuskan atau mengatasmakan sikap fraksi, bahkan bila pun mereka yang duduk sebagai pimpinan pansus. Permainan di dalam pansus itu diatur, ada yang duduk sebagai pimpinan pansus, ada yang menjadi lobbies antar fraksi, ada yang memerankan sebagai tim utama yang akan mengikuti sidang sejak pleno pansus, panja pansus, hingga tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Untuk yang terakhir ini makin mengecil jumlah personel timnya. Sisanya mereka hanya menjadi anggota pansus saja. Tentu ada yang memegang peran menentukan semua posisi pemain serta menentukan hal-hal apa saja yang boleh disampaikan, yang akan dinegosiasikan, dan yang akan dijadikan keputusan politik.

Menentukan pimpinan dalam sidang-sidang pansus biasanya atas hasil negosiasi yang sedikit rumit dan tampaknya hanya beberapa fraksi partai besar yang mampu mewarnai, setidaknya Golkar dan PDI Perjuangan. Fraksi Golkar terkenal sebagai fraksi yang memiliki banyak anggota DPR yang pandai memainkan negosiasi politik untuk menduduki pimpinan pansus-pansus vital. FB adalah salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar yang memiliki kapasitas politik yang hebat, dan hampir selalu memegang posisi sebagai ketua pansus-pansus vital.

Sementara itu PT diduga merupakan pemain kunci di balik layar yang menentukan keputusan-keputusan politik dari Fraksi PDI Perjuangan. Di Fraksi PAN, Ibu AJ menjadi salah satu pimpinan pansus, tetapi ada AT, seorang tokoh

politisi senior yang duduk dalam pansus yang sama. Beberapa tokoh lama di fraksi partai-partai lain juga menjadi pemain-pemain kunci dari setiap fraksi mereka. Saya melihat bahwa para pemain kunci hampir selalu terutama dipegang oleh kalangan yang sangat berpengalaman dalam berpolitik, boleh dikatakan mumpuni, dan rata-rata mereka sudah berusia matang. Sangat boleh jadi mereka adalah orang yang memiliki kedekatan dengan elite partai sehingga dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan partai. Tidak mudah mengamati mereka, bila kita merupakan orang awam, saya pun membutuhkan waktu yang lama untuk mencermati ini, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengetahui latar belakang hampir semua orang.

Tentu saja di dalam persidangan ada pula pemain-pemain muda, politisi muda. Rata-rata mereka orang-orang cerdas dan punya kemampuan politik yang dianggap lebih baik dari kolega mereka satu fraksi. Mereka tentu juga mewarnai persidangan ini. Warna lain yang juga tampak adalah kekuatan politisi perempuan. Selama dua kali periode DPR pasca reformasi, agaknya para politisi perempuan punya agenda yang sama walau pun mereka tidak berasal dari satu fraksi. Mereka ini seperti membangun kekuatan bargain yang berada di luar fraksi masing-masing khususnya di dalam isu quota 30 % keterwakilan perempuan. Didukung dengan media, isu 30 % ini dimainkan mereka untuk bargain pasal-pasal yang memberikan peluang besar ke arah keterwakilan perempuan 30% tersebut. Mereka mendapatkan pasal itu dalam pembahasan RUU Pemilu dengan negosiasi yang tidak mudah. Lena Maryana dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) merupakan anggota DPR perempuan yang mengusulkan quota keterwakilan perempuan 30% melalui penerapan sistem *zipper*, di dalam setiap pencalonan 3 nama harus ada satu perempuan. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia telah melobby sedemikian rupa agar pasal ini tidak berubah. Oleh karenanya ia tidak dapat melakukan bargain dengan memasukkan pasal-pasal lain lagi, sebab anggota DPR lainnya yang notabene laki-laki dan resisten terhadap pasal quota ini mengancamnya untuk barter pasal atau menukar pasal quota 30% dengan pasal lain. Sadar mereka menghadapi situasi yang sesungguhnya resisten, mereka tidak memajukan lagi tuntutan lainnya setelah mereka mendapatkan pasal

30 % quota perempuan itu. Demikianlah, persidangan dalam pansus yang vital berjalan seperti permainan catur. Di dalamnya penuh dengan peta posisi para pemain.

Yang terlihat di muka dan sering bicara tak selalu menjadi penentu yang mengambil keputusan. Demikian pula yang berada di ruang lobby, tak selalu yang memutuskan kesepakatan lobby. Seperti malam itu, saya mengikuti sidang hingga dini hari. Ketika situasi pendapat dalam sidang tak mencapai kata sepakat dalam beberapa point pasal, sidang masuk mekanisme lobby. Sebagian besar anggota DPR ada di dalam ruangan sidang, hanya sebagian kecil masuk ke dalam ruangan lobby, dan saya hanya bisa menyaksikan dari balik kaca. Lobby tidak membuahkan hasil. Mereka yang masuk dalam ruangan kaca di sebelah ruang sidang KK III yang merupakan tempat sidang pansus RUU Pemilu, bukan selalu yang memutuskan akhir. Sidang akhirnya dibawa ke paripurna DPR.

Lagi-lagi paripurna tak menghasilkan kesepakatan, walaupun paripurna telah memutuskan untuk melakukan lobby antar fraksi yang di dalam lobby tersebut para pimpinan fraksi bernegosiasi. Pimpinan fraksi pun tak dapat mengambil keputusan. Paripurna diperpanjang pada hari berikutnya. Kembali masuk mekanisme lobby. Dan barulah saat itu dapat diambil alternatif keputusan atau opsi-opsi yang ditawarkan dalam forum paripurna untuk diambil keputusan melalui voting anggota DPR. Jadi siapa yang sesungguhnya memutuskan keputusan politik dari fraksi-fraksi dalam persidangan, bila pun pimpinan fraksi bahkan tak dapat memutuskan ? Ada kekuatan politik yang nyaris tak tersentuh yang memutuskan. Anggota DPR sering mengatakan ada 'dewa-dewa' untuk menyebut mereka yang punya kekuasaan politik sedemikian kuat.

Sekarang mari kita lihat lebih dekat saja bagaimana sebuah sidang di DPR itu berlangsung. Sidang dilakukan di sebuah ruang sidang. Paripurna DPR, komisi-komisi serta alat kelengkapan DPR lainnya memiliki ruang sidangnya sendiri.

Ruang sidang DPR pada prinsipnya memiliki setting ruangan yang sama. Dari setting tempat duduk, hingga tata cara bersidang. Setting tempat duduk di DPR secara pokok terbagi atas 1 tempat duduk pimpinan sidang di bagian depan,

lalu di samping kanan dan kiri adalah tempat duduk untuk anggota DPR, dan berhadapan dengan tempat duduk pimpinan sidang adalah tempat duduk untuk tamu, biasanya digunakan untuk masyarakat yang melakukan pengaduan atau audiensi, atau sebagai tempat duduk pejabat pemerintah. Biasanya bila pejabat pemerintah hadir di DPR, ia akan membawa rombongan yang besar terdiri dari pejabat eselon I hingga para staf ahli. Seluruh bangku di deretan tamu biasanya penuh. Sementara di barisan akhir dari deretan sebelah kanan seringkali ditempati sejumlah staf ahli dari masing-masing fraksi. Jumlah staf ahli masing-masing fraksi tak banyak yang sering duduk mengikuti di sana. Jumlah yang tidak imbang dengan pemerintah. Terakhir adalah balkon digunakan sebagai tempat wartawan, pengunjung, masyarakat umum untuk menyaksikan sidang DPR.

Sidang DPR punya semacam ritual sendiri, misalnya dalam sidang komisi. Sidang dimulai dari pimpinan Komisi membuka sidang, ia membuka sidang dengan mengetuk palu sidang dua kali. Lalu mulai membuka pembicaraan, "sidang saya buka." Tentu hanya pimpinan sidang yang berhak untuk mengucapkan kalimat pembuka sidang dan mengetukkan palu. Kalimat itu juga hanya berlaku dan dipatuhi bila diucapkan oleh pimpinan sidang. Kekuatan dari ucapan itu terikat pada status otoritas yang dimiliki oleh penuturnya.

Setelah kalimat pembuka, pimpinan akan mengucapkan salam lalu mulai mengucapkan sapaan. Biasanya sapaan itu disertai menyebutkan ..." anggota sekalian yang terhormat..." Kemudian pimpinan mulai masuk pada pembicaraan misal mengingatkan sidang yang lalu atau pembuka konteks pembahasan. Bila komisi mengundang tamu baik dari masyarakat dan terutama pemerintah maka ketua komisi akan menyapa mereka, mengucapkan selamat datang dan basa-basi lainnya. Sapaan tersebut selalu diucapkan setelah sapaan kepada anggota DPR yang terhormat, menandakan otoritas kekuasaan DPR yang lebih tinggi daripada para tamu tersebut, sebab mereka adalah wakil rakyat. Saya mengamati bahwa hampir selalu pimpinan sidang komisi memulai pembukaan sidang dengan waktu yang cukup lama. Saya kira waktu 15 menit adalah waktu paling singkat untuk ritual pembukaan sidang di komisi. Lamanya waktu kalimat-kalimat pembuka dari pimpinan sidang komisi bahkan melebihi lamanya pimpinan sidang paripurna

DPR. Setelah itu pimpinan biasanya mempersilakan anggota DPR atau tamu untuk berbicara. Bicara juga punya aturan main, anggota DPR yang hendak bicara selalu meminta ijin ketua sidang sebelum bicara. Mereka biasanya mengatakan "minta ijin bicara ketua." Permohonan ijin ini adalah suatu bentuk sopan-santun tak tertulis.

Di dalam sidang paripurna, ritual pembukaan yang dipimpin pimpinan sidang yang juga merupakan Ketua atau Wakil Ketua DPR jauh lebih singkat. Yang menyebabkan bertele-tele karena interupsi anggota DPR. Ini terjadi dalam sidang paripurna yang mengangkat persoalan politis dan mengundang perhatian publik yang luas. Begitu pimpinan sidang mengetuk palu tanda dibukanya sidang paripurna, langsung saja sejumlah politisi menekan tanda *on* pada *microphone*, menginterupsi sambil menyebutkan nama dan nomor anggotanya. Hiruk-pikuk macam ini dapat terjadi sampai bermenit-menit lamanya. Pimpinan sidang yang tampaknya sudah kebal dengan situasi ini seringkali tidak menghiraukan dan terus bicara melanjutkan sidang.

Hujan interupsi itu menandai karakter yang berbeda dengan sidang paripurna di masa orde baru. Tentu saja suasana ini walau pun hiruk-pikuk namun menggambarkan suasana yang jauh lebih terbuka bila dibandingkan dengan masa orde baru. Di masa itu jangan harap ada interupsi bertubi-tubi. Tak mungkin juga "fraksi balkon," sebutan yang muncul dari Amien Rais, mantan Ketua MPR periode lalu kepada para mahasiswa reformasi 1998, sebutan itu kini diperluas dengan menyebut semua orang yang duduk balkon, tak hanya pada mahasiswa. Fraksi balkon alias mahasiswa, aktivis LSM, para tamu dan penggembira lainnya leluasa menempati tempat duduk di balkon untuk mengikuti persidangan paripurna sambil sesekali ikut berteriak, berseloroh, bertepuk tangan, bahkan menyoraki anggota DPR yang mengikuti sidang di bawah balkon.

Anggota DPR memang senang menginterupsi pembicaraan dalam sidang. Kata interupsi memang kata populer bagi anggota DPR. Sedikit-sedikit interupsi. Adakalanya anggota DPR salah mengucapkan kata interupsi menjadi kata "intruksi..intruksi..," hanya saja anggota DPR lainnya tentu saja mencoba mengerti, harap maklumlah. Sebagai catatan kosakata interupsi akan lebih sering

terdengar di sidang paripurna DPR, terutama bila topik yang dibahas kontroversial, politis, dan banyak disorot oleh wartawan. Mereka interupsi sambil menyalakan tombol microphone di meja, kadang-kadang sambil berdiri, dan sesekali menjadi hiruk-pikuk karena interupsi dilakukan tiada bersela. Saking hiruk-pikuknya kadang bagian operator microphone mematikan sebagian microphone, dan biasanya ruangan segera diramaikan dengan teriakan-teriakan anggota DPR yang protes.

Saya sering sekali melihat sidang paripurna selama tiga tahun ini, jadi saya membuat penyimpulan bahwa interupsi dalam sidang paripurna sesungguhnya adalah semacam aksi saja. Tak selalu berisi penyampaian aspirasi yang signifikan dan penting. Kadang-kadang lebih pada aktualisasi diri, mereka menyebut nama dan nomor anggota DPR, dengan itu mereka sekaligus menyatakan kehadiran dan perhatiannya terhadap sidang. Selebihnya aksi interupsi ini menjadi bagian dari permainan tekanan dalam sidang paripurna DPR. Terutama dilakukan oleh pihak fraksi-fraksi yang beroposisi terhadap wacana dominan yang sedang berkembang. Misal dalam isu kenaikan BBM, pasti interupsi akan banyak dilakukan oleh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan. Walaupun bila dihitung-hitung kalkulasi dukungan suara fraksi-fraksi sudah pasti sebagian besar memihak kebijakan pemerintah, namun toh interupsi dari pihak oposan yang sudah pasti kalah itu tetap berlangsung seru.

Tentu saja dalam sidang DPR selalu ada kontestasi wacana politik antara fraksi-fraksi yang mendominasi. Fraksi-fraksi dominan tak selalu sama, sifatnya dinamik saja. Tergantung kesamaan kepentingan dalam suatu konteks tertentu yang temporal. Bagi fraksi lain yang tidak sepakat dengan kelompok dominan, mereka melakukan *counter* wacana, tak hanya melalui pers, lobby, atau langkah-langkah prosedural, tetapi juga aksi-aksi teatrikal. Interupsi dapat menjadi salah satu bentuk aksi teatrikal yang ditujukan untuk menekan pihak-pihak yang berlainan pandangan.

Biasanya memang bila di sidang paripurna, anggota biasa akan sibuk dengan interupsi tersebut, serta sekali waktu menyampaikan usulan-usulan kecil yang tidak terlalu signifikan. Sementara untuk pembicaraan yang penting hanya

akan disampaikan oleh pimpinan fraksi yang dalam hal ini juga bertindak sebagai juru bicara fraksi. Demikian memang dalam sidang paripurna, tak semua tuturan memiliki kekuatan yang sama, tergantung dari posisi politik si penuturnya. Hanya tuturan yang disampaikan oleh pimpinan fraksilah yang memiliki kekuatan menentukan dan sekaligus mempunyai konsekwensi hukum dan politik.

Selama tiga tahun di DPR, saya mulai memperhatikan bahwa tak semua sidang paripurna ramai dihadiri sebagian besar anggota DPR. Hanya sidang-sidang dengan isu yang seksi yang akan menyedot perhatian anggota DPR. Di antara isu-isu seksi itu adalah sidang penentuan APBN yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM (2005), sidang mengenai beras impor, dan terakhir kali menyedot perhatian tahun ini adalah sidang RUU Pemilu. Sidang mengenai hak angket dan interpelasi kadang juga ramai di awal-awal periode jabatan DPR RI 2004-2009, namun karena selalu kandas, angket dan interpelasi pun tak lagi menarik perhatian.

Saya juga mengamati bahwa sekali pun di luar gedung Senayan, heboh orang berdemonstrasi, suasana itu tak selalu tercermin di ruang sidang paripurna. Baru-baru ini buruh pelabuhan berdemonstrasi di depan gerbang DPR. Semua media massa elektronik mengarahkan mobilnya ke depan gerbang dan mengambil gambar demonstrasi itu. Buruh menolak RUU Pelabuhan yang akan diputuskan di paripurna, mereka menolak upaya privatisasi pelabuhan. Sementara itu suasana sidang paripurna DPR yang mengambil keputusan terhadap RUU tersebut berjalan tenang-tenang saja, malah sepi. Tak sampai $\frac{1}{4}$ anggota DPR bertahan di ruang sidang paripurna.

Suasana sidang paripurna berbeda dengan suasana dalam sidang di komisi. Di komisi, hampir semua anggota DPR mendapatkan kesempatan berbicara. Mereka senang berbicara. Bila mereka sudah dipersilakan bicara oleh pimpinan sidang dan menyalakan *on* pada microphone (pengeras suara), maka mereka akan senang bicara panjang-panjang. Dimulai dari mengucapkan salam, biasanya masing-masing anggota fraksi di DPR ini punya salam yang khas sebelum atau setelah berbicara. Anggota DPR dari FPDS biasanya akan mengucapkan kata "saloom." Anggota DPR dari FPDI Perjuangan biasa berteriak, "merdeka !"

Sementara FPKB punya salam khas di akhir kalimat, "...*ayuhal mithorik...*" yang membedakannya dari salam fraksi lain yang juga berbasis agama yang sama seperti FPKS dan FPAN. Kekhasan salam itu sesungguhnya bermakna simbolik menyatakan identitas golongan politik yang bersangkutan.

Setelah salam, biasanya dilanjutkan basa-basi, menyapa anggota yang lain, menyapa pemerintah atau tamu lainnya, bicara berputar-putar dulu, bercanda, kalimat-kalimat yang penuh makna, kalimat-kalimat bersayap, dan bahkan ada yang kadang-kadang menyitir puisi, pengibaratan hingga ayat suci, seterusnya sebelum sampai pada maksud yang sesungguhnya. Seperti AG, politisi yang berangkat dari latar belakang aktivis ini mengurai kalimat penuh ibarat, untuk sampai pada kritik mengenai kinerja BPN, ia bercerita dulu mengenai cara menanak nasi, tak mungkin ada nasi kalau beras tidak dicuci dulu dan kemudian dimasak, di ujung kalimat barulah ia menyampaikan bahwa penyampaian Kepala BPN baru menjadi slogan saja mengenai reforma agraria, namun tidak menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah upaya merealisasi kebijakan tersebut.

Saya berkali-kali mengamati suatu sidang di komisi di mana anggota DPR bicara panjang tidak fokus, bahkan sampai 15 menit kemudian ia masih belum menyinggung sama sekali kasus yang dibicarakan. Bicara juga tidak selalu dimaksudkan untuk merespon hal yang disampaikan lawan bicaranya. Seperti dalam rapat antara DPR komisi II dengan DPRD Garut. Topik bahasannya adalah mengenai kasus Bupati Garut, tetapi anggota DPR justru bicara topik pemekaran.

Dalam berbicara, setiap anggota DPR punya karakter sendiri-sendiri. Ada anggota yang kalau berbicara runtut dan jelas, ada anggota DPR berbicara berputar-putar, ada pula yang berbicara dengan kalimat-kalimat bersayap yang berinterpretasi ganda. Ini soal keterampilan berbicara. Masing-masing punya gaya.

MW, seorang politisi perempuan yang berlatar belakang aktivis organisasi *underbouw* Golkar ini, bila ia bicara, ia hanya akan bicara seperlunya. Bicaranya pelan, tenang dan runtut, sangat empatik, menggiring wacana forum tetapi berbelok di belakang ekor kalimatnya. Suatu kali ia bicara dalam konteks

mengenai usulan pemerintah agar setiap dukungan terhadap calon perseorangan dalam pilkada dilengkapi dengan materai. Padahal syarat dukungan dalam analogi dengan calon Dewan Perwakilan Daerah yang tidak melalui dukungan partai, tidak dicantumkan adanya keharusan penggunaan materai dalam setiap lembar dukungan. Syarat materai itu dianggap memberatkan karena bila dihitung perkalian dengan banyaknya jumlah suara dukungan, jumlah financialnya dapat mencapai milyaran rupiah, hanya untuk materai saja. MW menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah sebab pada dasarnya usulan pemerintah mengenai materai tersebut disampaikan untuk mempersulit adanya calon perseorangan dalam pilkada. MW mengatakan, "...kita ini negara hukum, harus taat hukum, masyarakat harus dididik taat hukum.....saya ini orang hukum, perjanjian diatur dalam BW. Perlu ada materai tetapi nilainya diatur tersendiri." Kata-kata taat hukum itu bermakna positif. Kemudian ia menggiring wacana dengan mengatakan bahwa ia adalah orang hukum, kesan yang saya tangkap, ia menegaskan bahwa dirinya orang berlatar belakang hukum sehingga dianggap pasti mengerti soal hukum. Tetapi kalimat berikutnya adalah soal perjanjian dan membawa serta BW, salah satu sumber kitab hukum perdata. Jadi ia ingin meletakkan perjanjian dalam konteks politik ke dalam perjanjian perdata yang karenanya membutuhkan materai, menegaskan dukungannya pada usulan pemerintah. Padahal sesungguhnya dukungan politik bukanlah perjanjian sebagaimana perjanjian perdata. Prinsip bekerjanya dukungan yang sifatnya politik apalagi konteks tersebut dibahas dalam peraturan perundang-undangan yang tegas-tegas ada pada wilayah hukum tatanegara bukan perdata. Namun dengan pembawaan yang tenang dan meyakinkan MW bicara dan membawa opini dalam persidangan, tidak persoalan benar atau berbelok pernyataannya, yang penting adalah kemampuan retorika dalam mempengaruhi forum. Nyatanya memang satu dua orang merespon dan kemudian mendukung pernyataannya, tak kurang juga dukungan dari anggota fraksi lainnya terhadap pernyataannya.

Gaya retorika ini menunjukkan kapasitas bicara dalam persidangan yang dimilikinya. Rata-rata keterampilan ini bicara dengan gaya ini dimiliki oleh politisi berpengalaman lama. Gaya retorik MW bila diamati sungguh-sungguh

menunjukkan gaya khas yang dimiliki oleh politisi berlatar belakang organisasi mahasiswa tertentu atau politisi partai tertentu. Gaya khas dan kapasitas persidangan itu juga diakui oleh SH, seorang anggota DPR dari fraksi yang berseberangan dengan fraksi MW, suatu kali ketika saya bersama SH dalam perjalanan pulang setelah mengikuti sidang hingga larut malam. SH menceritakan mengenai teknik-teknik bicara dalam sidang, dan menunjukkan bahwa setiap anggota DPR yang memiliki latar belakang organisasi mahasiswa tertentu memiliki gaya standar dalam menggiring wacana forum. Keterampilan menggiring wacana forum tetapi dengan gaya yang berbeda, menurutnya juga dimiliki oleh AG, seorang anggota DPR dari fraksinya yang merupakan mantan aktivis gerakan mahasiswa.

Lebih jauh lagi cara MW menyatakan bahwa dirinya adalah "orang hukum," sebelum memulai menjelaskan argumentasinya, sebenarnya adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan dalam berbahasa. Ia sedang menggunakan kekuasaan yang berupa klaim pengetahuan guna mendapatkan pembenaran atas argumentasinya. Tidak soal benar atau salah, sebab salah pun dapat menjadi benar bila si penuturnya menggunakan legitimasi klaim pengetahuan yang diakui oleh lawan bicaranya. Penutur menggunakan klaim 'orang hukum' tujuan mendapatkan legitimasi dan pada akhirnya mendapatkan dukungan atas pernyataannya. Bahasa di sini menjadi sebuah praktek kekuasaan yang didasarkan pada klaim atas pengetahuan. (Foucault, 1980 dan Bourdieu (1991). Sebagaimana kasus sebelumnya di bagian awal bab ini, saya kembali memerlukan untuk meminjam gagasan Foucault yang secara kritis memeriksa relasi pengetahuan dengan kekuasaan. Menurutnya pengetahuan adalah alat bagi upaya melakukan dominasi kekuasaan yang bersifat sangat halus. Dalam konteks MW, pernyataan sebagai "orang hukum" adalah bentuk klaim pengetahuan yang dinyatakan oleh penuturnya untuk mempengaruhi suatu wacana di dalam persidangan. Dengan menyatakan diri sebagai orang hukum, MW berusaha mendapatkan legitimasi akademik, yang dengan legitimasi akademik tersebut ia menambahkan *power* di dalam tuturannya. Tidak penting soal bahwa yang dinyatakannya sesungguhnya menyesatkan, yang diperhatikan bukan kebenaran ilmiah melainkan kebenaran

terlegitimasi. MW melakukan suatu operasi kekuasaan untuk mempengaruhi wacana yang berlangsung sangat halus. Upaya mempengaruhi menurut saya merupakan tindakan dominasi dalam hal ini dominasi wacana terhadap publik. Nyatanya memang beberapa orang kemudian terpengaruh dan mengikuti argumentasi yang disampaikan MW. Di samping itu, kini menjadi relevan pula membicarakan bahasa sebagai instrumen kekuasaan. Bourdieu dalam Bourdieu and Wacquant (1992: 142) menolak reduksi bahasa ke dalam analisis linguistik semata. Ia tidak menginginkan bahasa terasing pada dirinya sendiri. Bourdieu (1991: 37) sendiri yakin bahwa bahasa bukan sekedar wadah kontemplasi di dalam bahasa itu sendiri melainkan bahasa adalah instrumen bagi aksi dan kekuasaan. Sebagaimana kita lihat dalam pernyataan MW, klaim legitimasi pengetahuan akademik yang ditempelkannya memberikan bobot (*power*) terhadap tuturannya. Bahasa dengan seketika memiliki suatu daya (*power*) sehingga ia tidak semata-mata menjadi tuturan saja, melainkan ia memerantarai suatu praktek dominasi.

Penggunaan klaim pengetahuan sebagaimana di atas juga seringkali muncul dalam pembahasan sidang-sidang di DPR, misalnya dalam konteks pembahasan RUU Pelayanan Publik sebagaimana disampaikan dalam sidang panja RUU tersebut oleh Hermansyah (Fraksi Partai demokrat) berikut ini, "...di negara-negara maju yang pelayanan publiknya bagus, Inggris misalnya.....dibuat kontrak antara warga negara dengan pemerintah setiap kali akan pemerintah akan membuat kebijakan layanan..." Pemerintah juga sering menggunakan klaim serupa dalam bersilat lidah dengan DPR, seperti dalam sidang mengenai revisi UU No 32 Tahun 2004 khusus mengenai calon perseorangan, pemerintah seringkali menggunakan contoh praktek calon perseorangan di negara asing, "...contohnya Amerika Serikat, di sana prakteknya...calon perseorangannya orang kaya..."

Konteks pernyataannya berbeda tentu dengan konteks pernyataan MW, namun modus kerja kekuasaan dalam bahasa sama saja. Negara maju, Inggris, Amerika dan seterusnya dicatut kemudian digunakan sebagai klaim untuk mendapatkan legitimasi dari pernyataan yang disampaikan penutur.

Selain soal gaya bahasa dan sesekali retorika yang kadang-kadang menyembunyikan penyesatan substansi itu, persidangan di DPR juga dipenuhi dengan modus pernyataan dengan maksud yang mengambang, tidak perlu jelas, dan multi interpretatif yang merupakan bagian dari keterampilan beretorika di depan publik. Salah satu contoh adalah pernyataan sikap pandangan akhir mini fraksi-fraksi dalam sidang RUU Pemilu, juru bicara salah satu fraksi menyampaikan pandangan fraksinya, "kami menyetujui proporsional terbuka terbatas supaya partai dapat menempatkan kader terbaiknya, kami juga setuju *electoral treshold* maupun *parliament treshold*, ini bukan prosentase tetapi uji publik, partai di Indonesia ini tambah atau hanya bolak-balik nama, kami juga sepakat sisa suara diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, karena ada partai yang perolehan suaranya banyak tetapi kursinya lebih sedikit, serta kami mendukung sepenuhnya quota tidak berbasa-basi, sebagai upaya mengikis patriarkhi..." Bagian akhir kalimatnya mendapat tepuk tangan meriah dari para aktivis perempuan yang duduk di atas balkon, sejumlah media massa juga mengarahkan sorot kameranya.

Mari kita teliti satu per satu maknanya. "Proporsional terbuka terbatas supaya partai dapat menempatkan kader terbaiknya," juga dapat diartikan bahwa partai hendak melakukan penempatan orang di daerah pemilihan tertentu dan tidak mau strategi penempatan orang itu terhambat oleh ide bahwa calon legislatif harus berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Kader terbaik juga multi interpretatif, sungguh-sungguh kader terbaik partai atau orang-orang yang merupakan orang-orang dekat atau faksi politik dari si penentu nama-nama calon legislatif.

"Partai Indonesia ini tambah atau bolak-balik nama," adalah sindiran bagi partai-partai lama yang tak mampu mengejar *electoral treshold* apalagi *parliament treshold*, lalu mengantisipasi ancaman bahwa mereka tidak dapat mengikuti pemilu karena gagal mencapai *electoral treshold*, dengan cara mengganti nama atau membolak-balik nama, misalnya PBB, Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan. Dengan pergantian nama maka partai yang bersangkutan dapat mengikuti pemilu 2009 dengan persyaratan yang berlaku bagi partai baru. Maka

kalimat SH dalam konteks ini menjadi sebuah sindiran politik bagi partai-partai kecil yang terancam tak dapat mengikuti pemilu.

”...serta kami mendukung sepenuhnya quota tidak berbasa-basi, sebagai upaya mengikis patriarkhi....” kawan di sebelah saya langsung tertawa mendengar kalimat ini, di tengah banyak tepuk tangan dari aktivis perempuan di atas balkon, kawan saya berbisik, ”quota tidak basa-basi itu konkritnya bagaimana, bunyi pasalnya secara konkrit apa?” Kami tersenyum bersama. Kalimat itu memang bersayap, tidak jelas maksudnya, masih perlu diinterpretasikan ulang, serta dilihat sungguh-sungguh bunyi pasalnya dalam hasil pembahasan RUU. Jadi kalimat dukungan terhadap quota perempuan itu sebenarnya adalah slogan kosong saja, tetapi biar pun demikian, toh mampu menarik simpati publik dilihat dari meriahnya tepuk tangan para pengunjung di atas balkon.

” Kami juga sepakat sisa suara diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, karena ada partai yang perolehan suaranya banyak tetapi kursinya lebih sedikit,” menyimpan makna tersembunyi dalam ” proporsi yang sebenarnya.” ” Proporsi yang sebenarnya” bermakna multi tafsir, bagi fraksi besar kata sebenarnya dimaksudkan dengan sisa suara dibawa di tingkat nasional, dengan demikian partai akan mendapatkan kursi tambahan sebanyak sisa suara yang diakumulasi nasional. Sementara bagi partai kecil, sisa suara dibagi di tingkat daerah pemilihan saja, sebab pada pemilu sebelumnya partai-partai kecil mendapatkan keberuntungan kursi dari sisa suara di setiap daerah pemilihan. PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merugi dengan pembagian sisa suara di daerah pemilihan. PKB yang perolehan suara nasionalnya melebihi Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan jumlah kursi DPR di bawah PAN. PDI Perjuangan perolehan sisa suaranya secara nasional bila dikonversi ke dalam jumlah kursi, nyaris sebanyak kursi yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera. Gara-gara interpretasi yang multitafsir dalam menafsirkan kata ”sebenarnya,” maka sidang di Pansus RUU Pemilu memerlukan lobby hingga tengah malam. Lobby itu pun tak menghasilkan kesepakatan sehingga polemik tersebut dibawa ke sidang paripurna. Sidang paripurna bahkan berjalan hingga dua hari hanya untuk menyepakati tafsir dari ”proporsi yang sebenarnya” mengenai sisa suara.

Saya merasa perlu untuk membongkar secara khusus bagian kalimat yang multitafsir ini, bukan pada soal memaknai kalimatnya melainkan pada soal proses kesepakatan politik dalam menterjemahkan interpretasi ke dalam pasal. Proses yang sebenarnya juga sama di dalam pencapaian kesepakatan mengenai pasal menyangkut keterwakilan perempuan quota 30 %. Agaknya saya perlu menjelaskan bagaimana suatu pasal dapat tertuang di dalam UU. Secara mekanis suatu RUU dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR yang terdiri dari masing-masing fraksi. Mereka membongkar pasal satu per satu melalui proses penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM), kemudian raker, kemudian masuk ke dalam panitia kerja, tim perumus, dan seterusnya tim sinkronisasi. Tetapi saya juga ingin menjelaskan proses itu dari sudut pandang berbeda dari proses mekanis penyusunan RUU. Pada dasarnya pasal itu dituangkan ke dalam bunyi tulis yaitu susunan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat tersebut sangat multitafsir. Setiap fraksi berhak mempunyai penafsiran sendiri-sendiri terhadap kalimat-kalimat tersebut. Penafsiran atas bunyi tulis kalimat itulah yang kemudian dibahas sedemikian rupa, kata per kata. Terkadang bukan hanya memakan waktu sesaat bahkan bisa berlangsung berhari-hari. Setelah ada kesepakatan penafsiran barulah kesepakatan tersebut dituangkan kembali dalam bentuk tulis, susunan kalimat, sehingga bunyi tulis tersebut adalah medium kesepakatan antar penafsiran. Penafsiran adalah representasi dari kepentingan fraksi-fraksi atau blok politik dalam pansus/komisi. Pertarungan antar kepentingan ini difasilitasi melalui transaksi bahasa dalam bentuk tulis. Untuk mendapatkan pasal yang diinginkan masing-masing pihak, mereka dapat saling mempengaruhi wacana melalui perdebatan argumentasi, dapat juga melalui lobby, juga barter (saling tukar) pasal. Sebagaimana disampaikan Lena Maryana di sela-sela sidang pansus RUU Pemilu kepada saya bahwa politisi perempuan di DPR melakukan lobby dan barter pasal untuk mendapatkan pasal yang mengakomodasi quota perempuan 30 % dalam pencalonan legislatif melalui sistem *zipper*, di antara 3 calon harus ada 1 calon perempuan. Dengan demikian pasal adalah bunyi tulis dari kesepakatan transaksional antar kepentingan. Di sini secara nyata bahasa dalam bentuk tulis, menjadi suatu locus dari praktek pertarungan kekuasaan, saling mempengaruhi,

maupun saling menukarkan kepentingan antar pihak. Persidangan DPR seperti medan relasi-relasi kekuasaan yang dapat saling dinegosiasikan, dan bahasa memegang peran sangat penting yaitu sebagai perantara dari transaksi kepentingan antar pihak.

Transaksi kepentingan dan kekuasaan yang diperantarai bahasa ini akan menjadi jauh lebih kompleks lagi ketika kita juga melihat siapa-siapa aktor yang dapat melakukan transaksi. Tak semua anggota pansus/komisi dapat melakukan transaksi kepentingan dalam pasal-pasal. Di sinilah pentingnya melihat posisi para aktor di dalam persidangan. Mengenai pola posisi aktor-aktor ini, saya telah membahasnya dalam paragraf-paragraf sebelumnya.

Demikianlah, anggota DPR memang pandai memainkan bahasa penuh makna yang tidak dapat dimaknai hanya dengan mendengar, tetapi harus memahami pula konteks politiknya serta konteks kepentingan si penuturnya. Mereka pandai mempengaruhi wacana, memainkan emosi pendengarnya, menimbulkan simpati, tanpa menyampaikan substansinya secara jelas dan lugas. Pernyataan yang mengilusi pendengarnya. Mereka juga pandai melakukan sindiran politik terhadap lawan politiknya.

Saya sendiri membutuhkan waktu untuk memahami setiap kalimat yang disampaikan, harus berulang-ulang bertanya kepada sumber-sumber yang saya rasa mereka mengerti maksud-maksud dalam bahasa politik, saya juga harus berulang-ulang mencermati dan mengikuti pembahasan sidang demi sidang agar mengerti konteks pembicaraan yang dituturkan oleh para politisi Senayan ini. Interpretasi yang saya buat atas tuturan mereka tentu saja bukan kebenaran mutlak, melainkan juga usaha mendugai, memperkirakan makna yang sedapat-dapatnya mendekati maksud si penutur dengan mempertimbangkan konteks sosial yang berlangsung, konteks kepentingan dan latar belakang si penutur, serta konteks peristiwa saat tuturan itu disampaikan.

Memang dalam bicara anggota DPR pandai memainkan bahasa, termasuk bila itu dimaksudkan untuk pesan sindiran terhadap seseorang, tidak secara langsung pada orang yang dituju. Demikian pula dengan jawaban atas sindiran tersebut, juga tidak disampaikan langsung pada si penutur sindiran. Peristiwa

tukar bahasa tidak berlangsung antara penutur yang bersangkutan dengan lawan bicaranya, melainkan peristiwa tukar bahasa antara mereka berlangsung dalam konteks yang penuh dengan orang-orang lain di sekitarnya. Pesan menjadi tidak tunggal, majemuk, dan ditangkap secara majemuk pula. Sangat kompleks. Bagi penutur pertama, pesan tersebut bisa jadi dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari orang-orang lain di sekitarnya dan juga aktualisasi diri. Menjadi lebih interaktif lagi ketika juga ada representasi publik di sana termasuk kamera wartawan.

Saya punya contoh lain selain yang di atas, yaitu ketika rapat kerja Komisi II dengan BPN berlangsung, sesekali ada wartawan mengambil foto, seorang anggota Komisi II, Bapak JJ berkata, " Saya yakin kita bisa...asal tanggungjawabnya sama...." Ia melanjutkan, "pemerintah mau bagi-bagi tanah, sangat mungkin program pemerintah disesuaikan dengan penyelesaian kasus tanah. Jangan ada oknum," nada kalimatnya ditekan, " yang mengambil keuntungan di atas kepentingan rakyat. " Ia melanjutkan kembali, "Supaya publik tahu....sementara persoalan-persoalan rakyat tidak diselesaikan. Kita bikin *timing* penyelesaian...siapa DPR di situ dan mempermainkan keadilan kita sikat...!..siapa BPN yang main-main..disikat." Kata, siapa DPR di situ dan kata sikat ditekankan oleh si penutur.

Salah satu pimpinan sidang yang sekaligus wakil ketua komisi merespon setelah mendapat ijin dari ketua sidang. Ia, Bapak ID mengatakan, "saya ngantuk, ...apa Pak JJ masih merasa dalam suasana kampanye..." Setelah itu ia menerangkan strategi penanganan kasus. Kata yang digarisbawahi adalah sindiran terhadap Bapak JJ yang sebelumnya pernah mencalonkan diri menjadi bupati di salah satu Kotamadya dan kalah. Anggota DPR lainnya dalam ruang sidang tersebut tertawa.

Apabila dibaca terpisah dan tidak dilekatkan pada konteks, pasti dua tuturan itu dianggap sebagai dua tuturan yang tidak berhubungan. Tetapi sebenarnya dua tuturan tersebut saling berhubungan, bukan selalu dalam bentuk tuturan dan jawaban yang relevan tetapi berisi saling pesan.

JJ menyindir anggota DPR yang mengambil keuntungan dari penyelesaian kasus tanah, sekaligus menunjukkan di hadapan publik, apalagi ada wartawan, bahwa dirinya adalah anggota DPR yang berani dan berpihak pada keadilan. Suatu bentuk pesan aktualisasi diri. Sementara itu ID menjawab tuturan pesan JJ dengan suatu sindiran mengenai aktualisasi JJ dengan menyindir pencalonan JJ sebagai bupati.

Sementara audience, orang-orang lain di antara dua penutur tersebut menunjukkan pengertiannya atas makna dalam pesan dua penutur tersebut dengan tertawa. Tertawa adalah respon, memberikan pesan makna, bahwa mereka mengerti maksud dari perkataan/tuturan dua orang tersebut. Demikianlah peristiwa bahasa melampui situasi yang kompleks. Dalam peristiwa tersebut terjadi suatu dialektika *event* dan *meaning* yang kompleks. Yang terjadi bukan hanya *event*, peristiwa bahasa saja antara JJ dan JJ, melainkan ada pula pertukaran *meaning* di sana. Yang ditangkap pesannya sehingga menimbulkan tawa audience bukanlah gramatikal bahasa (*langue*) melainkan isi pesan. Namun demikian peristiwa itu tidak akan menimbulkan kesan respon bila dituturkan dalam konteks situasi yang tidak politis seperti di DPR ini, dan si penutur serta para penerima tuturan bukanlah pelaku politik. Dengan demikian dialektika *event* dan *meaning* membutuhkan suatu konteks sosial yang tepat sehingga menjadi bermakna. Di situlah letaknya wacana. Wacana (*discourse*) setidaknya dicirikan dalam 4 hal, 1) wacana terkait tempat dan waktu, 2) ia juga memiliki subjek penutur yang berbicara, 3) menunjukkan sesuatu yang sedang dibicarakan yaitu merujuk pada dunia yang digambarkan, 4) wacana merupakan lokus terjadinya peristiwa komunikasi berupa pertukaran *event* dan *meaning*. (Ricouer, 1981: 133). Di DPR, dialektika *event-meaning* ini berlangsung dalam situasi yang kompleks.

Bahasa politik punya karakter tersendiri, anggota DPR suka sekali menggunakan konteks isu yang sedang populer sebagai sindiran bahasa politik. Misalnya ketika Megawati mengkritik kebijakan Presiden ibarat menari poco-poco maju satu langkah mundur dua langkah, atau dengan kata lain, tidak ada kemajuan berarti dalam kebijakan pemerintah. Kritik itu menjadi isu yang populer sekali di komunitas politik seperti DPR. Maka salah seorang pimpinan komisi, JJ

yang berasal dari partai pendukung pemerintah menggunakan kritik tersebut dalam konteks baru yaitu persidangan raker komisi II dengan BPN. Konteks pembahasan dalam persidangan ini adalah mengenai kinerja BPN dalam penyelesaian kasus-kasus tanah. Ia sedang menganalogikan penyelesaian konflik tanah dengan mekanisme penyelesaian kasus di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya ia mengatakan, "Bagaimana teknis eksekusinya? Eksekusinya di BPN....Jadi sekarang tidak poco-poco lagi..sekarang teknisnya bagaimana, saya kira itu yang kita bicarakan."

Dengan demikian maka kritik Megawati ditempatkan pada konteks baru di dalam pernyataan IJ. Dalam konteks baru ini maka kritik berubah menjadi bahasa kiasan. Sekarang "tidak poco-poco" memiliki kecenderungan arti yaitu kinerjanya sudah berjalan. Sebentar kita meminjam Ricouer, (1981: 139-141, 185) pada konteks otonomisasi teks. Ricouer menempatkan otonomisasi teks pada bentuk teks tertulis, di mana bahasa tutur diubah menjadi bahasa tulis (teks). Ada proses distansiasi di sana. Namun distansiasi tersebut memberikan tempat bagi otonomisasi teks, yang juga turut memberikan peluang adanya apropriasi yang kaya dari pembaca. Di sini saya tidak akan bicara banyak mengenai otonomi teks tulis, melainkan hanya tuturan saja, namun demikian kita bisa meminjam penjelasan Ricouer di sana untuk menjelaskan situasi kemungkinan terlepasnya tuturan dari maksud penuturnya, lalu mendapatkan makna baru di dalam tuturan orang lain. Tuturan begitu terlepas (dekontekstualisasi) dari penutur, dimungkinkan mendapatkan suatu tempat baru (rekontekstualisasi) dalam tuturan penutur baru.

Dalam kasus kritik terhadap kinerja pemerintah yang seperti menari poco-poco sebagaimana yang disampaikan Megawati, apabila kita anggap kalimat Megawati sebagai sebuah teks, maka teks itu telah melepaskan dirinya dari konteks pernyataan yang disampaikan Megawati dalam acara PDI Perjuangan di Palembang, lalu kalimat itu ia mengalami dekontekstualisasi, sebegitu rupa terlempar dari konteks tuturan Megawati, selanjutnya ia mendapatkan konteks baru dalam pernyataan IJ. Dengan kata lain teks Megawati mengenai poco-poco itu mengalami rekontekstualisasi baru dalam pernyataan yang disampaikan IJ.

Sesuatu yang khas dalam komunitas politik yang berulang-ulang kita bahas di atas adalah bahwa bahasa adalah penyampai kekuasaan. Saya sekali lagi ingin menunjukkan contoh bahwa bahasa sekali lagi dapat melukiskan gambaran relasi kekuasaan antar institusi. Pasca sidang pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum yang baru SM menyampaikan bahwa sebagai simbol bahwa KPU lama telah selesai bertugas, ia mengusulkan agar pimpinan Komisi II menjenguk Nazaruddin di rutan. Langsung saja FB memotong, dengan mengatakan bahwa ini adalah proses formal, KPU diundang secara kelembagaan. Hubungannya adalah kelembagaan, melalui mekanisme kelembagaan. SC menimpali, dengan mengatakan persetujuannya pada FB, bahwa yang sifatnya pribadi disampaikan secara pribadi, sementara ini adalah persoalan kelembagaan. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa nanti wartawan bicara berbeda dengan kunjungan pimpinan Komisi II ke rutan. Ia menegaskan agar pimpinan Komisi II mengundang saja KPU lama. Kalimat datang ke rutan berlawanan dengan mengundang ke DPR. Kalimat mengundang ke DPR secara simbolik menyatakan kekuasaan kelembagaan yang besar dari DPR kepada lembaga pemerintah seperti KPU, sehingga hubungan kelembagaan yang pantas adalah KPU diundang di gedung DPR.

Selain soal kekuasaan dalam bahasa, berbicara juga perlu keterampilan bersiasat. Kalimat boleh beda, asal maksudnya sama. Ini dilakukan untuk menyiasati keadaan atau berkelit dari suatu kondisi tertentu. Saya punya contohnya, dalam sidang pemilihan anggota KPU yang baru itu hanya terpilih 20 nama, padahal dalam UU No 22 Tahun 2007, DPR harus menyodorkan 21 nama usulan kepada Presiden. Sayangnya hanya 20 nama yang namanya tersebut dalam pemilihan, nama ke 21 tidak mendapatkan suara. Jadi diusulkan supaya hanya 20 nama saja yang diajukan kepada Presiden. Usulan tu ditolak sebab bunyi UU harus 21 nama diusulkan. Pimpinan komisi membuat pernyataan sederhana saja, "Bukan tak dipilih, tapi tak ada suara. Jadi tetap diajukan 21 nama, yang tak ada suaranya di nomor 21." Perkataan yang sangat sederhana, hanya membalik kata-kata saja, tak dipilih sebenarnya artinya sama dengan tidak ada suara, tapi ia membalik kata-kata itu dengan serhana, bukan tak dipilih, tapi tak ada suara. Apa

bedanya dua kalimat itu, maknanya sama. Tapi pernyataan itu mengelakkan kondisi dan meredakan keributan akibat silang silih pendapat antara anggota DPR lainnya, serta mensiasati ketentuan dalam undang-undang. Ini soal permainan siasat kata-kata saja.

Selain berbicara, anggota DPR memiliki hak bertanya pada pemerintah, jadi bila DPR menggelar rapat kerja komisi, maka banyak dari mereka yang berlomba mendapatkan kesempatan bertanya. Bertanya itu ada beberapa kategori, pertama, boleh jadi memang itu pertanyaan sangat penting dan sangat substansial. Biasanya anggota DPR yang bersangkutan telah menyiapkan pertanyaan tersebut sebelum sidang dimulai, bahkan menyiapkan bahan-bahan pembahasan sidang yang dimaksudkan, hingga mengadakan rapat kelompok komisi (poksi) terlebih dahulu. Ada pula pertanyaan tersebut pertanyaan yang muncul seketika dalam sidang setelah mendengar penyampaian pemerintah dan sangat penting untuk disampaikan. Tak jarang anggota DPR meminta pada stafnya untuk membuat daftar pertanyaan yang akan disampaikan dalam sidang. Tetapi terkadang pertanyaan tersebut diajukan untuk ya sekedar bertanya saja, sekedar aktif bertanya. Seperti cerita Ar kepada saya bahwa anggota DPR yang dibantunya selalu memintanya membuat daftar pertanyaan untuk nanti disampaikan dalam sidang komisi. Tidak penting soal implikasi dan tindak lanjut atas pertanyaan itu tidak dianggap terlalu penting oleh anggota yang bersangkutan, sebab tujuannya ya hanya untuk bertanya saja.

Bertanya adalah soal penting bagi kebanyakan anggota DPR, bukan hanya soal substansi kepentingan politik, tetapi juga soal aktualisasi diri mereka. Bertanya juga dianggap penting untuk laporan kepada fraksi bahwa yang bersangkutan terlibat aktif berada dalam sidang. Biasanya ada staf kelompok komisi di fraksi (poksi) yang duduk dan mencermati sidang sambil mencatat isi rapat, mendapatkan bahan-bahan untuk poksi, serta mencatat form kehadiran anggota DPR dalam sidang komisi. Catatan staf ini penting untuk laporan dalam rapat pimpinan komisi. Selain soal kehadiran, laporan keaktifan bertanya dianggap sebagai point penting yang perlu diketahui pimpinan fraksi. Bertanya akan menjadi lebih penting lagi ketika persoalan yang dibahas mendapat banyak

perhatian dari media massa, baik cetak dan terlebih lagi bila turut hadir pula media elektronik yaitu televisi. Dengan demikian, bertanya bukanlah soal isi substansi saja, melainkan juga menjadi bagian dari perilaku simbolik dari anggota DPR. Isi pertanyaan tidak selalu penting, tetapi yang penting adalah makna simbolik dari tindakan bertanya itu sendiri.

Bertanya juga ada tekniknya. Kebanyakan anggota DPR tidak akan bertanya langsung pada pokok pertanyaan. Ada anggota DPR yang akan berputar-putar dulu, memberi pengantar yang panjang baru sampai pada inti pertanyaan yang sesungguhnya. Seringkali juga apa yang ditanyakan, secara tak langsung telah dijawabnya sendiri, sehingga sebenarnya tidak ada pertanyaan. Bertanya menjadi bentuk respon saja atas penyampaian dari lawan bicara misalnya pihak pemerintah.

Sidang DPR juga tak selalu berlangsung dalam suasana yang serius. Suasana terkadang sangat cair dan penuh canda-canda yang bermakna. Burhanuddin Arifonang, seorang anggota DPR, menuliskan catatan canda-canda DPR dalam sebuah buku kecil, "Tertawa Ngakak Ala Senayan."

Memang demikian adanya. Sidang komisi kadang serius, namun tak jarang berlangsung berjalan penuh dengan tawa. Bahkan anggota-anggota DPR sendiri sering menjuluki kawan-kawannya sebagai bahan lelucon. Julukan tersebut terkadang disesuaikan dengan bentuk fisik tubuh anggota DPR, atau gosip yang beredar, atau aktivitas populer anggota DPR tertentu. Misal dalam suatu sidang komisi untuk pengambilan suara mengenai KPU, setiap kali pimpinan sidang menyebut nama anggota DPR yang mendapatkan kesempatan memberikan suara, anggota DPR yang lain menyeletuk dan diikuti tawa anggota lainnya atau tepuk tangan. Pimpinan sidang memanggil anggota komisi satu persatu. "ND....silakan." ND maju dengan diiringi tepuk tangan meriah dan celetukan kepada Ibu ND yang memang cantik. "Sucipto," kata pimpinan komisi. Kembali anggota bertepuk-tangan dan salah seorang di antara mereka menyeletuk..."Gubernur Jatim..." Kebetulan Sucipto memang sedang mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur. Saling celetuk masih terjadi, ketika anggota DPR yang bertubuh kurus maju ke depan. Anggota lain meledek dengan mengatakan "Bang Toyip...Bang

Toyip..."seperti judul lagu dangdut. Begitu juga ketika seorang anggota DPR yang bertubuh kecil dipanggil, "kecil-kecil cabe rawit..gak nyampe, gak nyampe..." diikuti tawa semua orang. Sampai ketika salah seorang anggota DPR perempuan yang juga dikenal sebagai aktivis, Nursyahbani Katjasungkana dipanggil namanya, kembali anggota DPR lainnya menyeletuk, "hidup gender..."

Sekalipun sidang DPR kadang penuh sindiran, celetukan, canda, namun sidang DPR juga punya tata aturan main. Biasanya aturan main merupakan kesepakatan sidang, akan tetapi ada seakan-akan tata aturan main tak tertulis yang begitu saja terjadi. Misalnya terlihat dalam sidang pemungutan suara calon anggota KPU. Ketika didiskusikan mengenai urutan pengambilan suara pimpinan melontarkan pertanyaan, "apa menurut urutan absen atau pimpinan terlebih dahulu?" Sebagian mengusulkan anggota DPR memilih terlebih dahulu, tetapi ada anggota DPR yang langsung menanggapi dengan mengatakan, "...enggaklah, pimpinan dulu."

Pimpinan sidang kemudian berkata, "Pimpinan dulu, karena saya pimpinannya..." Ia tersenyum. Akhirnya diputuskan pimpinan komisi memberikan suara terlebih dahulu baru anggota komisi urut absensi. Jadi Mangindaan maju dulu, ia memberikan suara lebih dahulu kemudian tandatangan. Waktu ia memasukkan kartu dalam kotak suara transparan yang ada di tengah-tengah ruang sidang. Tampaknya semua kamera mengarah ke sana. Setelah memasukkan kertas suara ke dalam kotak tersebut, ia lalu mengangkat tangan melihat ke arah wartawan. Kamera televisi segera menyorotnya, demikian juga dengan kamera wartawan foto. Semua tepuk tangan. Setelah itu pengambilan suara dilanjutkan berturut-turut Idrus Marhan (Fraksi Golkar) Fahrudin (FPDIP), Sayuti (FPAN), dan Taufiqurrahman (FPKB). Setelah semua pimpinan itu selesai, pimpinan sidang kemudian mengabsen satu-satu dipanggil namanya untuk maju ke depan dan memberikan suaranya.

Satu per satu anggota DPR maju, menulis, dan kemudian memasukkan kertas suara dalam kotak di tengah ruang sidang tersebut, setelah itu beberapa dari mereka menganggukkan kepala kepada pimpinan komisi di depan. Anggukan itu seperti tanda penghormatan kepada pimpinan. Ketua sidang membalas dengan

anggukan pula sambil tersenyum. Menurut saya rangkaian adegan tersebut seperti dituntun oleh kesadaran misterius, bagaimana pimpinan harus memberikan suara terlebih dahulu dan bagaimana anggota menganggukkan kepala kepada pimpinan sidang tanda hormat.

Berperilaku dalam sidang melengkapi adegan di dalam ruang sidang DPR. Beragam perilaku anggota DPR dalam sidang. Di sidang komisi yang saya amati, ada anggota DPR yang senang keluar-masuk ruang sidang. Sebentar-bentar menerima dan menelepon, sms. Sepertinya ia menjadi kelihatan sebagai anggota DPR yang sibuk dibanding rekan-rekannya. Ada juga yang mencuri kesempatan membaca koran. Ada yang sigap begitu datang langsung membuka laptop. Ada yang selalu siap dengan setumpuk bahan di meja, tapi ada juga yang datang melenggang saja cukup dengan mengenggam handphone. Ada yang menyempatkan diri mengambil gambar koleganya dengan kamera digital dan kemudian meminta staf ahli untuk mengambil gambar situasi forum dan tentu saja juga gambar dirinya di dalam ruang sidang.

Tingkah laku di dalam sidang akan lebih kompleks lagi bila sidang tersebut mendapat perhatian dari kalangan media massa. Seperti gaya pimpinan komisi yang mengangkat tangan ke arah wartawan setelah memasukkan kertas suara dalam kotak pungutan suara KPU. Masih ada banyak gaya lain yang ditunjukkan anggota DPR. Ibu ND misalnya, ia mencium kertas suara ke arah wartawan sebelum memasukkan kertas suara ke dalam kotak. Sebagian besar anggota memasukkan kertas suara dengan menghadap ke arah publik, wartawan dan memungungi pimpinan sidang. Sorotan kamera media cetak dan elektronik seakan-akan menjadi fokus yang menjadi prioritas orientasi dari tindakan para anggota DPR itu. Tindakan mereka adalah tindakan komunikasi terhadap media untuk mengaktualisasikan diri mereka di hadapan media, melalui gaya atraksi mereka masing-masing.

Interaksi dengan media massa bila diamati lebih jauh tidak hanya terjadi dalam situasi wawancara verbal saja. Lihatlah gaya Ibu ND dengan mencium kartu suara ke arah publik termasuk kamera wartawan tentu saja, sebelum ia memasukkan kartu suara ke dalam kotak. ND tampaknya sadar betul sidang DPR

pada hari ini adalah sebuah panggung pertunjukkan di hadapan publik, sehingga ia tanpa ragu menampilkan aktraksi teatrikalnya dengan mencium kartu suara. Tindakannya jelas saja mengundang respon publik, tepuk tangan dan sorot media massa.

Komunikasi langsung dengan media melengkapi komunikasi aktraksional interaktif dalam sidang. Sebenarnya selama sidang berlangsung komunikasi antara media massa dan anggota DPR dapat berlangsung. Media dapat saja mewawancarai anggota DPR, biasanya anggota DPR akan keluar sejenak dari ruangan sidang untuk wawancara. Atau media memilih menyerbu anggota DPR untuk wawancara pasca sidang. Biasanya media saya lihat memilih anggota DPR yang komunikatif dengan media massa. Dari FPKS, AP, MZ saya lihat paling komunikatif dengan media, FB dari FPG sangat komunikatif, sementara NKS dari FPKB diburu media karena dianggap banyak menyuarakan isu gender.

Setiap anggota DPR saya duga punya strategi sendiri dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan media massa. Tetapi tak ada salahnya mengatakan jawaban paling standar dalam wawancara dengan wartawan menyangkut sikap atau hasil-hasil keputusan politik. Sebagaimana jawaban ND pasca pemilihan anggota Komisi Pemilihan umum (KPU), ia diwawancarai wartawan RCTI pasca pemilihan anggota KPU, di bawah sorotan 3 kamera wartawan, ia mengatakan, "sudah sesuai peraturan perundang-undangan,... ini sudah layak...30%, ini sudah lebih dari dua orang." Jawaban itu standar, semua orang tahu bahwa mekanisme pemilihan anggota KPU harus dilakukan sesuai petunjuk dalam UU terkait. Semua juga sudah tahu dengan isu quota 30% perempuan. Semua orang yang hadir di ruangan itu juga tahu kalau jumlah anggota KPU hanyalah 7 orang, tiga perempuan terpilih artinya telah melebihi 30% quota perempuan yang dalam hitungan jumlah adalah dua orang. Jadi jawaban ND benar-benar jawaban standar yang nyaris semua orang di ruangan sidang termasuk wartawan sudah tahu informasi itu. Sekali lagi, jawaban ND adalah bagian dari strategi retorika standar saja dalam menghadapi wartawan, memberitahu yang mereka sudah tahu dan meyakinkan semua proses berjalan sesuai undang-undang.

Demikianlah kadang ruang sidang bagi saya bak panggung teater. Di penuh aksi teatrikal dari pada aktor. Mereka menggunakan bicara, bertanya, menyindir, tertawa dan juga perilaku untuk memerankan karakter dirinya dalam pentas sidang DPR tersebut.

Dalam aksi teatrikal tersebut, tak lupa kostum adalah soal yang penting untuk memperkuat watak/karakter peran yang dimainkan. Oleh karena itu atribut kostum di Senayan juga hal yang penting untuk diperhatikan. Ada pula anggota DPR perempuan yang menggunakan kostum unik yang khas bagi dirinya. Ada bapak anggota DPR yang senang memakai batik, ada yang senang menggunakan jaket hitam, ada ibu anggota DPR yang senang mengenakan topi pengganti jilbab, ada yang senang memakai selendang, ada yang kerudungnya divariasikan, ada yang senang dengan kalung yang modelnya panjang hingga dada dengan bandul yang besar sekali. Pokoknya boleh dikatakan penampilannya *fashionable*.

Anggota DPR tampaknya sadar pentingnya atribut kostum dalam aksi teatrikalnya dalam sidang DPR. Tetapi bahkan juga ketika ia berada di luar suasana sidang DPR. Ia melakukan aksi teatrikal perseorangan yang dimainkan untuk mendapatkan simpati dari khalayak yang diharapkan menerima pesan tersebut. Misalnya seorang anggota DPR, SH yang suatu hari mengenakan topi pet dan jaket, bukan jas seperti kesehariannya. Topi itu dikenakan karena ia hendak menemui petani-petani yang sedang berdemonstrasi di luar dan kemudian beraudiensi ke fraksinya. Masih ingat Yacobus Mayong Padang tatkala menolak kenaikan BBM yang pertama dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla? Ia mengenakan baju hitam-hitam dan membuat tenda di depan *press room*. Atau lihat saja Muchtar Ngabalin yang selalu menggunakan sorban, tak ada orang lain di DPR yang mengenakan tutup kepala dengan sorban seperti yang dilakukan Muchtar Ngabalin. Dengan kata lain ia menggunakan sorban kepala sebagai kostum yang menjadi ciri khas sehingga dengan mengenakannya yang bersangkutan mudah dikenali.

Dalam sidang paripurna tertentu, di mana Fraksi PDI Perjuangan berposisi terhadap kebijakan pemerintah, mereka sering mengenakan atribut-atribut yang seragam untuk menunjukkan soliditas mereka, seperti harus

mengenakan jaket hitam, atau merah dalam sidang paripurna. Sebagai ilustrasi tambahan, dalam sidang paripurna mengenai beras impor, Fraksi PDI Perjuangan yang menolak kebijakan tersebut, mewajibkan seluruh anggotanya yang datang ke dalam sidang paripurna mengenakan caping petani bertulis "Tolak Beras Impor." Bukankah ini bentuk-bentuk yang atributif yang dikenakan untuk menguatkan peran mereka dalam sebuah pentas politik yang dipenuhi atribut yang teatrikal.

